

e-news letter

JULI III 2020

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# PKS PARLEMEN

KREKAS SUBSTANTIF



**Teddy Setiadi, S.Sos**

Parliamentary Threshold 5 %

# Cegah Semakin Terbelahnya Bangsa

# Melepas Tanggung Jawab, Acuh Terhadap Janji

Kita harus menghentikan polarisasi politik langsung dari hulunya, akibat massif-nya politik dinasti dan oligarki kekuasaan. Untuk kesekian kali kita bukan hanya terjebak pada dampak buruk, namun juga melahirkan energi negative yang laten dan menahun

Kembali menorehkan rekor, kasus Covid 19 melampaui negeri tirai bambu. Berdasarkan data yang dihimpun Worldometers, sejak Sabtu (18/7/2020), total kasus positif di Indonesia tercatat 84.882 berada di atas China yang mencatatkan 83.644 kasus. Negeri yang ditengarai menjadi awal mula penyebaran Covid 19. Namun demikian tidak banyak yang berubah dari kita bersikap, terlena kala memasuki masa transisi, ditengah janji Pemerintah yang tidak akan segan-segan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jika terjadi lonjakan. Faktanya : tidak ada yang berubah. Melepas Tanggung Jawab, Acuh Terhadap Janji.

Melihat sebaran data tersebut Pemerintah buktinya belum berpikir mengeluarkan

kebijakan rem darurat atau emergency brake policy. Malah Pemerintah bersiap melakukan gas polli tanpa rem. Trabas dan bablas, tanpa batas. Terlebih punya dukungan (koalisi) dominan di politik, kebijakan aji pumpang tancap terus ditengah pagebluk covid 19 yang masih mendera. Gunakan dukungan public (*social awareness distancing*).

Disisi lain, euphoria pilkada menyeruak. Wajah ceria para kontestan yang dibalut masker ditengah covid 19 menggejalat masuk keruang publik via peraga kampanye. Meski wajah tak nampak, namun dari raut kelopak mata yang muncul 'diada juga'. Terpapar sejumlah etika publik yang tak lagi

diperhatikan karena kontestasi diusung dari tempat pengambil keputusan negara. Padahal sejatinya ketika seseorang sudah mengabdikan kepada negara maka harus menjaga jarak dan membatasi diri sesuai konstitusi. Terabas Terus, Gas Polli!

Cukup! Kita harus menghentikan polarisasi politik langsung dari hulunya, akibat massif-nya politik dinasti dan oligarki kekuasaan. Untuk kesekian kali kita bukan hanya terjebak pada dampak buruk, namun juga melahirkan energi negative yang laten dan menahun. Dipupuk secara berkepanjangan dan terus menerus, karena bagi sebagian pihak situasi yang tidak ideal kerap menjadi semacam komoditas penghasil pundi penghasilan.

Agar pada akhirnya setiap pemimpin yang dihasilkan berpijak atas hukum, paham yang mana harus di tanda tangan dan mana yang tidak. Sehingga tidak mudah dikangkangi oleh orang-orang seperti Djoko Tjandra.

Dorongan terhadap keberagaman kepemimpinan mutlak dibutuhkan dalam konstestasi politik ditingkat lokal maupun nasional, karenanya FPKS DPR



RI mendorong lahirnya kepemimpinan yang demokratis dimulai sejak dari 'rahim' pemilihan. Rancangan Undang Undang (RUU) pemilu yang partisipatif dan kolaboratif mutlak dihadirkan. Fraksi PKS ingin RUU Pemilu ke depan menghadirkan demokrasi yang naik kelas untuk menghadirkan pemimpin yang semakin berkualitas. Rakyat semakin cerdas dengan pilihan yang beragam sebagai pemilih.

Fraksi PKS DPR RI mendorong adanya batas parlemen atau Parliametary Threshold DPR lima persen sebagai bentuk komitmen pada upaya penyederhanaan partai politik dan sistem kepartaian. Dengan demikian masyarakat dan parpol tidak ada yang merasa dipasung dan dimatikan paksa hak-hak politik dan aspirasinya. Itulah pentingnya penyederha-

naan secara gradual. Oleh karena itu Fraksi PKS mengusulkan PT 5 persen, naik 1 persen dari pemilu yang lalu.

Fraksi PKS mengusulkan agar presidential threshold diturunkan sama dengan parliamentary threshold, sehingga setiap partai yang lolos ke Senayan dapat mengajukan pasangan calon presiden-wapres.

Membahas RUU Pemilu memang terkesan terburu-buru dan ambisius, namun pada kenyataan politik seringkali jika tidak antisipatif sejak awal maka yang seringkali terjadi adalah pilihan yang terbatas (*limited choice*) dan ruang kendali yang minim (*limited access*). Kita harus pastikan bahwa ruang kendali ada di rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sistem demokrasi. Mutlak dan Harus!

Angka ambang batas pencalonan presiden yang tinggi hanya menguntungkan partai politik besar. Karena itu mari kita mengajak seluruh partai politik untuk bisa mewujudkan ini jadi salah satu kategori pemilu yang aspiratif dan demokratis itu adalah adanya kompetitif

**HM. NASIR  
DJAMIL, M.Si**  
Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (17/07) — Komisi II DPR saat ini sedang menyusun draf RUU Pemilu. Satu di antara isu yang berkembang adalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Berkaca pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu, ambang batas presiden 20 persen dinilai berbagai kalangan membatasi dan menghalangi seseorang berkontestasi dalam pemilihan presiden.

Sebab pada saat itu, hanya menghasilkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Oleh karena itu angkanya tidak boleh kecil dan juga tidak boleh besar artinya pertengahan sehingga semuanya bisa

## BERITA UTAMA

dpr.go.id | Kamis 16 Juli 2020

f Fraksi PKS DPR RI @fraksipksdprri @fpkdsdprri fraksi.pks.id



### Soal Presidential Threshold

# Legislator PKS: Angkanya Tidak Boleh Kecil & Tidak Boleh Besar



masuk," kata anggota DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil dalam webinar Voice For Change bertajuk 'Presidential Threshold Nol Persen di Mata Partai Politik' yang dimoderatori Aktivist '98 Niko Adrian, Jumat (17/7/2020).

Anggota Komisi III DPR RI itu menekankan bahwa Pemilu harus digelar secara aspiratif dan demokrasi.

la menilai perwujudan itu bisa ditunjukkan dengan kebijaksanaan dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden.

Nasir mengingatkan angka ambang batas pencalonan presiden yang tinggi hanya menguntungkan partai politik besar.

"Karena itu mari kita mengajak seluruh partai politik

tidak bisa mewujudkan ini jadi salah satu kategori pemilu yang aspiratif dan demokratis itu adalah adanya kompetitif," ujarnya.

"Jadi kalau kemudian ambang batasnya terlalu besar itu tidak kompetitif, hanya partai-partai tertentu kemudian yang bisa melaju," imbuhnya.

Atas dasar itu, Nasir berharap pada pembahasan

RUU Pemilu nanti, semua fraksi partai politik bisa menunjukkan sikap saling menghormati.

Sehingga pengalaman buruk Pilpres 2019 tak terulang di Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan saja pembahasan RUU Pemilu diwarnai semangat demokrasi dan menghargai partai-partai kecil dan menghormati yang besar," pungkasnya.



## Terkait Parliamentary Threshold 5 %

# Legislator PKS: Cegah Makin Terbelahnya Bangsa

Dengan ambang batas 5 %, kemungkinan calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasang akan semakin besar, calon-calon yang berkualitas semakin terakomodir untuk dipilih sehingga potensi keterbelahan masyarakat bisa terminimalisir karena calonnya lebih dari dua pasang.

**TEDDY SETIADI, S.Sos.**

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (14/07) — Anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi menegaskan, bahwa PKS ingin mencegah semakin terbelahnya bangsa, akibat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdapat dua pasangan calon saja.

"Sebagaimana kita ketahui, pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 dan tahun 2019 hanya diikuti dua pasang calon saja. Apa dampaknya? Rakyat terbagi dalam dua kubu yang mengakibatkan semakin dalamnya keterbelahan bangsa", ujarnya.

Bila kita cermati, lanjut Teddy, kehadiran dua pasangan calon presiden dan wakil presiden ini karena aturan presidential threshold (PT) yang menyaratkan ambang batas

pengajuan calon presiden dan wakil presiden dengan dukungan partai politik (parpol) atau gabungan parpol sebanyak 20% suara nasional atau 25% kursi di parlemen. Karena tingginya PT tersebut, pada dua pemilu terakhir hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Oleh karena itu untuk mengakomodir calon-calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas, Kita mengusulkan untuk menurunkan PT menjadi 5% dan ini memang senada dengan kebijakan fraksi PKS," ujar Teddy

Dengan ambang batas 5 %, kata Teddy, kemungkinan calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasang akan semakin besar, calon-

calon yang berkualitas semakin terakomodir untuk dipilih sehingga potensi keterbelahan masyarakat bisa terminimalisir karena calonnya lebih dari dua pasang.

"Apabila hanya ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden, pilihannya hanya dua A atau B. Kalo bukan memilih A berarti dipersepsikan bahwa dia memilih B, sehingga masyarakat akan semakin menjauhkan diri dari orang lain yang pilihannya yang berbeberangan. Berbeda apabila calonnya lebih dari dua pasang, tidak memilih A bisa jadi memilih B, C, atau D, sehingga tidak akan tercipita dua kutub yang saling bertolak belakang, tetapi akan tersebar ke beberapa kutub yang lain sehingga potensi keterbelahan bangsa bisa lebih diminimalisir," tandasnya.

Teddy berharap bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden nanti bisa menjadi ajang adu ide, gagasan, juga sarana silaturahmi dengan hadirnya banyak kandidat ketika PT 5%, sehingga kita punya banyak alternatif solusi dalam menghadapi masalah bangsa yang muncul dikemudian hari.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

DUKUNG USULAN PT 5 PERSEN

# PKS: Akomodir Calon Pemimpin Berkualitas

Pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 dan tahun 2019 hanya diikuti dua pasang calon saja. Apa dampaknya? Rakyat terbagi dalam dua kubu yang mengakibatkan semakin dalamnya keterbelahan bangsa.

PKS ingin mencegah semakin terbelahnya bangsa, akibat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdapat dua pasangan calon saja.



Untuk mengakomodir calon-calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas, Kita mengusulkan untuk menurunkan PT menjadi 5% dan ini memang senada dengan kebijakan fraksi PKS

**Teddy Setiadi, S.Sos.**

Anggota Komisi II DPR RI



## Tidak Perlu Ada Pengganti, Pancasila Sudah Final!

# Fraksi PKS Tetap Minta RUU HIP Dicabut

Kami menyimak pernyataan pers pimpinan dewan bersama para menteri yang hari ini datang ke DPR. Pertanyaan kami mungkin sama dengan pertanyaan publik: bagaimana status RUU HIP setelah pemerintah masuk dengan konsep RUU BPIP? Apakah RUU BPIP ini RUU baru atau apa. Apalagi disertai permintaan agar publik tidak lagi mempermasalahkan RUU HIP, sebaliknya memberi masukan RUU BPIP.

### Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (16/7) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mempertanyakan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR siang tadi. Pasalnya Pimpinan DPR menyatakan DPR bersama Pemerintah akan membahasnya jika telah menerima masukan dari publik secara luas.

Jazuli mempertanyakan konsep RUU BPIP ini apa

statusnya? Apakah RUU baru inisiatif Pemerintah atau DIM dari RUU HIP yang secara luas ditolak publik? Lalu bagaimana status RUU HIP, apakah jalan terus atau dibatalkan?

"Kami menyimak pernyataan pers pimpinan dewan bersama para menteri yang hari ini datang ke DPR. Pertanyaan kami mungkin sama dengan pertanyaan publik: bagaimana status RUU HIP setelah

pemerintah masuk dengan konsep RUU BPIP? Apakah RUU BPIP ini RUU baru atau apa. Apalagi disertai permintaan agar publik tidak lagi mempermasalahkan RUU HIP, sebaliknya memberi masukan RUU BPIP," ungkapnya.

Fraksi PKS hanya mendapat informasi bahwa pemerintah akan menyampaikan surat resmi tentang RUU HIP. Ternyata baru diketahui Pemerintah mengajukan konsep RUU BPIP yang substansinya berasal dari Perpres BPIP. Apa urgensinya RUU BPIP ini sehingga khusus diajukan Pemerintah?

"Karena tidak terlibat dalam pembicaraan dengan wakil pemerintah yang hadir di DPR tadi, Fraksi PKS tidak dapat informasi utuh soal hasil pertemuan, apa konteks Pemerintah memasukkan konsep RUU BPIP dan sikap resmi pemerintah terhadap RUU HIP apakah lanjut atau tunda atau menarik diri. Tentu pimpinan DPR harus menginformasikan kepada Fraksi-Fraksi sebagai



representasi lembaga DPR terkait konsep RUU BPIP yang diajukan Pemerintah," terang Jazuli.

Fraksi PKS sendiri tetap pada sikap untuk meminta pembatalan RUU HIP sebagaimana aspirasi ormas, tokoh, purnawirawan TNI/Polri akademisi, dan masyarakat luas. Seharusnya pimpinan dewan merespon penolakan luas itu secara arif dan bijaksana. Apalagi saat ini tidak ada urgensinya atas RUU tersebut karena prioritas negara menangani pandemi covid-19.

"Fraksi PKS juga tidak ingin lembaga DPR terkesan mengelabui rakyat dengan mengubah judul RUU HIP. RUU HIP dinilai publik secara luas

bermasalah secara filosofis, yuridis, dan sosilogis yang artinya salah paradigma sejak awal. Maka permintaan untuk didrop atau ditarik dari prolegnas sangat rasional dan tidak perlu ada penggantinya," ungkapnya.

Fraksi PKS, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, berpendapat kalupun ada usul baru RUU yang berbeda sama sekali dengan RUU HIP maka semestinya diproses dari awal sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu diuskan melalui mekanisme prolegnas, dibahas bersama di Baleg DPR, sehingga jelas paradigma naskah akademik dan RUU nya serta siapa pengusulnya.

## Polemik RUU HIP,

# RUU HIP Belum Ada Kejelasan, RUU BPIP Tiba-tiba Masuk

RUU tersebut belum ada dalam daftar prolegnas dan belum ada pembicaraan kesepakatan dalam rapat pleno baleg DPR, yakni antara DPR dan Pemerintah untuk menyepakati bahwa RUU yang baru ini menjadi prioritas 2020

### **KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (18/07) — Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf memprotes adanya RUU Pembinaan HIP yang masih tertera sebagai RUU Prioritas Tahun 2020. Dalam pandangannya, terdapat sejumlah kejanggalan dari RUU tersebut.

“Pertama, RUU Pembinaan HIP sesungguhnya sudah dibahas dan sudah disahkan pada tanggal 12 Mei oleh sidang paripurna dan hanya PKS yang menolak (red: saat pengesahan 12 Mei berjudul RUU Haluan Ideologi Pancasila, bukan lagi RUU Pembinaan HIP)” tuturnya.

Alasan kedua, sambungannya, apabila daftar atau nama

Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila yang dimaksud bukanlah RUU yang sudah menjelma menjadi RUU HIP, maka tindakan tersebut menyalahi prosedur.

“Sebab, RUU tersebut belum ada dalam daftar prolegnas dan belum ada pembicaraan kesepakatan dalam rapat pleno baleg DPR, yakni antara DPR dan Pemerintah untuk menyepakati bahwa RUU yang baru ini menjadi prioritas 2020”, ungkapnya.

Pada rapat paripurna 16 Juli lalu, Bukhori selaku utusan Fraksi PKS juga menyampaikan protes sekaligus meneruskan aspirasi dari masyarakat luas antara lain MUI, PBNU,

Muhammadiyah, MOI, LSM, dan seluruh komponen masyarakat, khususnya pendemo yang menuntut agar menghentikan pembahasan RUU HIP dan segera mencabutnya dari daftar prolegnas.

“Oleh sebab itu, saya mengusulkan pada rapat paripurna hari ini agar dapat menyepakati dan menetapkan tuntutan para massa dan sikap masyarakat tentang penolakan terhadap RUU ini, supaya menghentikan pembahasan RUU HIP sekaligus mencabutnya dari daftar prolegnas” pungkask Bukhori dalam Rapat Paripurna (16/07) lalu.

Sebagai informasi, RUU HIP (red: dalam lampiran Baleg berjudul RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila) tercantum dalam daftar 37 Prolegnas Prioritas 2020 yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada 16 Juli 2020.

### **RUU BPIP Melanggar Prosedur Hukum**

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VIII DPR ini juga mengkritisi usulan Pemerintah mengganti RUU HIP dengan



RUU BPIP yang tidak melalui prosedur.

Bukhori meminta agar RUU BPIP yang diusulkan Pemerintah tersebut diajukan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“RUU HIP ini belum ada kejelasan, bahkan belum dicabut dari prolegnas, akan tetapi tiba-tiba RUU BPIP masuk ke prolegnas. Seharusnya, jika ingin mengganti, maka dicabut dulu RUU HIP-nya kemudian mulai lagi dari awal prosesnya

sebagaimana sudah diatur dalam peraturan DPR tentang Tata Tertib dan Undang-Undang” tandasnya.

“Pertanyaannya adalah, apakah RUU BPIP yang diusulkan oleh Pemerintah sebagai pengganti RUU HIP tersebut memenuhi sejumlah ketentuan yang sudah diatur oleh konstitusi (red: UU dan Peraturan DPR)? Jika tidak, maka otomatis RUU ini melanggar prosedur hukum” pungkask Bukhori.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Apakah RUU BPIP yang diusulkan oleh Pemerintah sebagai pengganti RUU HIP tersebut memenuhi sejumlah ketentuan yang sudah diatur oleh konstitusi? Jika tidak, maka otomatis RUU ini **melanggar prosedur hukum**”

**KH. Bukhori, Lc., M.A.**  
Anggota Baleg DPR RI

# RUU HIP Belum Ada Kejelasan, RUU BPIP Tiba-tiba Masuk

RUU BPIP belum ada dalam daftar prolegnas dan belum ada pembicaraan kesepakatan dalam rapat pleno baleg DPR



# Legislator PKS Minta DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas di Masa Sidang Terdekat

PKS sendiri akan terus kawal tentang RUU HIP ini sampai benar-benar dibatalkan, didrop dari Prolegnas dan tidak dibahas sama sekali di parlemen. Untuk itu kami mendesak Bamus dan Pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat pencabutan RUU HIP pada sidang terdekat. Rakyat butuh kepastian

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Baleg DPR RI

Jakarta (16/07) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, minta DPR pada masa persidangan ke-5 yang akan datang, menjadwalkan pembahasan pencabutan RUU HIP, yang merupakan RUU inisiatif DPR, dari Prolegnas 2019-2024.

Sedikitnya ada 2 alasan mengapa RUU HIP itu dicabut. Pertama karena adanya penolakan masyarakat terhadap RUU ini sudah sangat meluas, baik dari kalangan Islam, nasionalis, purnawirawan, agamawan,

maupun tokoh daerah.

Kedua, Presiden melalui Surpres (Surat Presiden), yang disampaikan oleh Menkopohuk kepada Pimpinan DPR RI, tidak setuju dengan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) dan mengajukan usulan konsep RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) (16/07).

"Dengan penyerahan Surat Presiden (Surpres), yang berisi ketidaksetujuan Pemerintah atas RUU HIP, kepada DPR RI, maka secara resmi kini bolanya

ada di tangan DPR RI.

"Maka sesuai dengan Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib DPR khususnya pasal 141, dalam masa sidang yang akan datang, DPR mestinya sudah melakukan pembahasan untuk menetapkan status pencabutan RUU HIP ini dari Prolegnas", kata Mulyanto.

"Jadi, sangat tepat sekali dengan mempertimbangkan kemampuan DPR dalam menyelesaikan program legislasi nasional serta aspirasi yang berkembang luas di masyarakat bila DPR, sesuai dgn usulan Pemerintah, mending RUU HIP dari Prolegnas", imbuhnya.

Namun demikian, Mulyanto menambahkan, terkait dengan RUU BPIP yang merupakan RUU inisiatif Pemerintah yang baru diajukan, ini perlu pencermatan lebih lanjut. Karena ia merupakan dua RUU yang sangat berbeda dan dengan inisiatif yang juga berbeda.

"RUU HIP inisiatornya adalah DPR. Sementara RUU BPIP inisiatornya adalah Pemerintah", jelas Mulyanto.



Selain itu RUU HIP sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020, sementara RUU BPIP ini baru usulan inisiatif Pemerintah, yang bahkan belum masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2019-2024.

"Ini adalah dua RUU yang sama sekali berbeda", tandas Mulyanto.

Pemerintah dan DPR tidak dapat menukar kedua RUU tersebut begitu saja.

Untuk itu menurut Mulyanto terkait RUU BPIP, yang merupakan RUU inisiatif Pemerintah, maka alur logika pembentukan

nya harus melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari awal. Tidak bisa serta-merta ditukar-guling.

"PKS sendiri akan terus kawal tentang RUU HIP ini sampai benar-benar dibatalkan, didrop dari Prolegnas dan tidak dibahas sama sekali di parlemen. Untuk itu kami mendesak Bamus dan Pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat pencabutan RUU HIP pada sidang terdekat. Rakyat butuh kepastian," tegas Mulyanto.

# Fraksi PKS akan Kawal RUU HIP Sampai Dibatalkan Dari Prolegnas

itu PKS mendesak Pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat pencabutan RUU HIP pada sidang terdekat. Masyarakat membutuhkan kepastian. Penolakan masyarakat terhadap RUU HIP yang sudah sangat meluas, baik dari kalangan Islam, nasionalis, purnawirawan, agamawan, maupun tokoh daerah menjadi dasar pertimbangan PKS untuk menolak pembahasan lanjutan RUU ini.

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (19/07) — Pemerintah memastikan menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Namun, sebagai gantinya pemerintah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memperkuat badan yang terbentuk melalui Peraturan

Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Sumfi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/07/2020) lalu.

Menanggapi hal ini, Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya di Jakarta (19/07). Anis mengatakan bahwa RUU HIP

dan RUU BPIP adalah dua produk hukum yang berbeda, baik dari sisi substansi maupun sisi statusnya.

"Dari sisi substansi, RUU HIP mengatur haluan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Sementara RUU BPIP berisi ketentuan yang mengatur kelembagaan Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang sekarang ini dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden," ungkapnya.

Dari sisi status, lanjutnya, RUU HIP adalah salah satu dari RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020, yang telah selesai dibahas oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Badan Legislasi dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna.

"RUU ini telah dikirimkan kepada Presiden dan mendapat jawaban Surat Presiden (Surpres). Sementara RUU BPIP baru saja diserahkan oleh pihak Pemerintah, yang tindak lanjutnya masih harus dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPR RI," imbuhnya.

Selain itu, katanya, RUU



HIP inisiatornya adalah DPR, sementara RUU BPIP inisiatornya adalah Pemerintah. "Pemerintah dan DPR tidak bisa menukar kedua RUU tersebut begitu saja," katanya.

Lebih jauh, Anis menjelaskan mekanisme pengusulan RUU baik dari pemerintah maupun dari DPR. Jika Pemerintah berinisiatif mengajukan RUU BPIP ke DPR, maka prosesnya harus sesuai dengan Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak bisa langsung mengusulkan draf RUU baru sebagai pengganti RUU inisiatif DPR.

"DPR dan Pemerintah harus menghormati ketentuan pembentukan peraturan

perundang-undangan yang ada," tegasnya.

Terkait sikap partainya, Anis menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal RUU HIP sampai benar-benar dibatalkan dan didrop dari Prolegnas.

Untuk itu PKS mendesak Pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat pencabutan RUU HIP pada sidang terdekat. "Masyarakat membutuhkan kepastian," tandas Anis

Penolakan masyarakat terhadap RUU HIP yang sudah sangat meluas, baik dari kalangan Islam, nasionalis, purnawirawan, agamawan, maupun tokoh daerah menjadi dasar pertimbangan PKS untuk menolak pembahasan lanjutan RUU ini.

## Gelombang Penolakan Rakyat di Bandung

# Teddy: Cabut saja RUU HIP

Sekarang tinggal tanyakan saja, ada tidak yang mendukung RUU HIP ini? Kalo rakyat tidak ada yang mendukung RUU HIP ini, justru timbul banyak penolakan, ya buat apa diteruskan?

### **TEDDY SETIADI, S.Sos.**

Anggota Komisi II DPR RI

Bandung (13/07) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menanggapi maraknya aksi penolakan dari berbagai macam golongan masyarakat terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Dalam keterangannya Teddy mengatakan bahwa wakil rakyat sudah seharusnya meneruskan aspirasi rakyat.

"Kalo rakyat menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kita sebagai wakil rakyat harus meneruskan aspirasi penolakan itu dengan mencabut RUU HIP dari Prolegnas," tutur Teddy.

Sebagaimana diketahui, Jumat lalu, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aksi Rakyat Jabar Menolak RUU HIP digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, 10/7/2020. Salah satu isi tuntutan adalah mencabut RUU HIP dari prolegnas bukan menunda

pembahasannya.

"Sekarang tinggal tanyakan saja, ada tidak yang mendukung RUU HIP ini? Kalo rakyat tidak ada yang mendukung RUU HIP ini, justru timbul banyak penolakan, ya buat apa diteruskan?" Tanya Teddy

Sampai sejauh ini belum ada aspirasi masyarakat yang mendukung RUU HIP, yang ada justru gejala dimana-mana.

"Kita ini wakil rakyat, kalo rakyat yang diwakili saja tidak setuju, kenapa ngotot dipertahankan? Justru ini yang menambah kecurigaan masyarakat akan bangkitnya PKI, toh rakyat gak setuju malah pembahasannya ingin dilanjutkan." Tutur Teddy

Teddy menambahkan bahwa masalah bangsa kita masih banyak yang harus segera diselesaikan,

pengangguran yang meningkat, kemiskinan yang semakin bertambah, belum selesai juga pandemi covid 19, sudah saatnya anggota DPR membuktikan kerja kita sebagai wakil rakyat bukan malah membuat gaduh masyarakat.

"PR Kita masih banyak, sudah saatnya kita bekerja lebih giat, lebih peka dan lebih peduli kepada kepentingan rakyat. Rakyat bebannya sudah banyak jangan ditambah lagi dengan beban yang tidak penting" pungkas Teddy



Negara



ur Wa . M.A

publik



**Hidayat Nur Wahid** ✓

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS



Itu berita tidak valid. Sejenis "hoax". Itu kerjaan media, agar beritanya dibaca dibuatlah judul sensasional. Sayangnya masih ada saja pembaca yang mau jadi korban judul berita, tak kritis dan tak mau baca beritanya secara benar. Dan bukan begitu juga cara pencapresan di PKS. #Hoax

gelora.co

**Puji Mendagri, PKS Lamar Tito Jadi Capres di 2024?**



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Dukung Tes Swab Massal Prajurit TNI

## Komisi I DPR: Asal Alat Mencukupi

Bagus, saya setuju banget. Bahkan mestinya sudah dari kemarin-kemarin nggak usah nunggu kejadian di Secapa AD. Karena tentara kita harus sehat semua agar dapat bertugas dengan baik

**Dr. Abdul Kharis A, SE. M.Si.Akt**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

## Dukung Tes Swab Massal Prajurit TNI

# Komisi I DPR: Asal Alat Mencukupi

Bagus, saya setuju banget. Bahkan mestinya sudah dari kemarin-kemarin nggak usah nunggu kejadian di Secapa AD. Karena tentara kita harus sehat semua agar dapat bertugas dengan baik

### **Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (13/07) — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta semua prajurit TNI dites swab virus Corona (COVID-19). Komisi I DPR menganggap hal itu ide bagus jika alat tes mencukupi.

“Menurut saya bagus-bagus saja kalau memang alat kita cukup untuk semua ya, prajurit TNI kan banyak sekali, kalau memang kita punya alat tes yang cukup saya rasa itu ide bagus,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kepada wartawan, Jumat (10/7/2020).

Meski begitu, Meutya mengatakan perlu juga adanya langkah pencegahan seperti penerapan physical distancing saat latihan serta kamar tidur asrama yang tidak berkerumun. Dia menilai proses selama pendidikan juga perlu diperhatikan karena rentan terjadi penularan.

“Tapi kan tetap ya, yang paling utama adalah preventif, kalau dites berkali-kali, tapi tidak ada perubahan atau tidak ada modifikasi dari cara-cara latihan, pengajaran, penginapan, baik di barak ataupun asrama, maka ya tetap rentan,” ujarnya.

Sama halnya dengan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Dia mendukung adanya tes swab secara masal agar semua prajurit dapat bertugas dengan baik.

“Bagus, saya setuju banget. Bahkan mestinya sudah dari kemarin-kemarin nggak usah nunggu kejadian di Secapa AD. Karena tentara kita harus sehat semua agar dapat bertugas dengan baik,” kata Kharis.

Sebelumnya, permintaan pemeriksaan swab buat seluruh prajurit TNI ini tidak terlepas

dari kemunculan kluster Corona di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI AD Bandung, Jawa Barat. Prabowo meminta seluruh prajurit TNI dites swab corona, agar siap sedia saat diperintahkan menjalankan suatu tugas. Prabowo ingin pemeriksaan swab kepada seluruh prajurit TNI dilakukan secara berkesinambungan.

“Terkait dengan hal tersebut, Pak Prabowo meminta ada tes swab massal memang kepada seluruh prajurit TNI, agar semuanya selalu siap sedia menjalankan tugas. Apalagi saat ini TNI menjadi salah satu ujung tombak penanganan COVID-19 di lapangan,” kata juru bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjutak, kepada wartawan, Jumat (10/7/2020).

“Beberapa kali (tes swab) sudah dilakukan di beberapa unit dan kesatuan. Beliau minta bisa dilakukan secara berkesinambungan dan lebih luas, karena prajurit TNI banyak turun, terlibat langsung dalam penanganan COVID-19, termasuk yang di Wisma Atlet dan di banyak tempat lainnya,” lanjut Dahnil.



# Toriq Dorong Lima Langkah Hentikan Kasus Eksploitasi ABK Indonesia di Kapal Cina

“Terimakasih kepada petugas gabungan di Kepri yang ketika mendapat info awal segera bergerak dan bekerja keras menyelidiki kasus ini bahkan berhasil mengamankan tersangka pelaku bersama barang bukti. PKS berharap agar pelaku segera diproses hukum”

## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan rasa prihatin atas berulangnya kasus eksploitasi yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal penangkapan ikan berbendera Cina.

“Hampir 3 bulan berturut kasus eksploitasi ABK asal Indonesia terus terjadi dan berujung pada hilangnya nyawa. Dengan demikian atas nama PKS, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada ABK asal Lampung, Hasan Afriadi yang meninggal dunia. Semoga

keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah SWT”, ungkap Toriq Hidayat.

Lebih lanjut, Toriq memberikan apresiasi kepada petugas gabungan yang terdiri dari Bakamla Kepri, KPLP, Lanal Batam, Ditpolairud Polda Kepri, Satreskrim Polres Karimun dan Satpolair Polres Karimun atas keberhasilannya mengungkap kasus eksploitasi terhadap ABK asal Indonesia di dua kapal berbendera Cina.

“Terimakasih kepada petugas gabungan di Kepri yang ketika mendapat info awal segera bergerak dan bekerja keras menyelidiki kasus ini bahkan berhasil mengamankan

tersangka pelaku bersama barang bukti. PKS berharap agar pelaku segera diproses hukum”, ungkapnya.

Berulangnya kasus eksploitasi bahkan berujung pada kematian yang menimpa PMI yang bekerja sebagai ABK di kapal Cina membuat PKS akan mendorong Pemerintah Indonesia melakukan beberapa hal untuk menghentikannya. yang pertama, memastikan Pemerintah Cina serius mengusut tuntas kasus-kasus eksploitasi ABK asal Indonesia di kapal-kapal Cina.

“Kedua, melaporkan kasus ini ke Dewan HAM PBB sebagai bentuk protes keras atas hilangnya nyawa rakyat Indonesia. Posisi Cina yang kuat di diplomasi internasional akan berpotensi membuat kasus ini tidak berujung” ungkap Toriq.

Ketiga, lanjutnya, segera ratifikasi ILO 188 agar Pemerintah Indonesia memiliki kekuatan hukum internasional untuk melindungi PMI yang bekerja sebagai ABK. Hal penting lainnya segera keluaran Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar ada kepastian hukum bagi PMI



yang bekerja sebagai ABK, ada sistem rekrutmen jelas dan pengawasan hulu-hilir terkait pekerja sektor perikanan.

“Keempat, jika semua langkah di atas dalam jangka pendek gagal maka Pemerintah bisa mengambil langkah melakukan moratorium pengiriman PMI ke kapal ikan asing. Sulit dan mungkin sakit bagi ribuan ABK, tapi ini menyangkut harkat dan martabat serta nyawa rakyat Indonesia yang terlunta-lunta di

negara orang. Eksploitasi dan kejahatan kemanusiaan harus dihentikan”, Tambah Toriq.

Kelima, kata Toriq, Pemerintah menyiapkan sektor perikanan kelautan nasional menjadi raksasa baru pasca Covid-19 dalam membangkitkan perekonomian nasional ke depan. Tahun 2045 bukan waktu yang lama, penuhi 22 ribu kapal ikan di atas 100 gross ton dalam waktu secepatnya agar semua ABK memiliki kesempatan kerja.

## Rencana Pengembangan Lumbung Pangan di bawah Kemhan

# Sukamta: Sebaiknya Dikaji Dulu yang Matang

Ada beberapa sektor penting untuk membangun ketahanan nasional, kan tidak berarti Kemhan mengurus semua hal. Kementerian pertanian, Bulog, Badan Ketahanan Pangan yang selama ini mengurus soal pangan, harus dilihat sebagai satu kesatuan usaha membangun ketahanan nasional

### H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Yogyakarta (14/07) — Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo untuk memimpin pengembangan lumbung pangan nasional pada saat kunjungan di Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).

Menurut Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta semestinya rencana tersebut harus didahului dengan kajian yang matang.

Hal ini mengingat ketahanan pangan adalah isu strategis nasional dan saat ini negara sedang terdampak pandemi. Demikian pesan tertulis disampaikan Sukamta, Senin, (13/07/2020).

"Situasi krisis pangan memang sudah membayang, tetapi itu jangan disikapi

dengan membuat keputusan secara terburu-buru. Kita tentu tidak berharap ini hanya menjadi kebijakan populis seperti lahan sejuta gambut pada masa lalu namun ternyata alami kegagalan. Apalagi jika melihat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pengembangan lumbung pangan selain di Jawa dan Bali diarahkan ke Sumatera dan Sulawesi. Sementara di Kalimantan dimantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia. Artinya rencana pengembangan di Kalimantan ini tidak sinkron dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ada," ungkap Anggota

Badan Anggaran DPR ini

Wakil Ketua Fraksi PKS ini memandang ada 3 persoalan terkait rencana ini yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pemahaman pangan sebagai unsur penting membangun ketahanan nasional bukan berarti sektor ini harus dipegang Kementerian Pertahanan.

"Ada beberapa sektor penting untuk membangun ketahanan nasional, kan tidak berarti Kemhan mengurus semua hal. Kementerian pertanian, Bulog, Badan Ketahanan Pangan yang selama ini mengurus soal pangan, harus dilihat sebagai satu kesatuan usaha membangun ketahanan nasional. Kemhan saya lihat sudah punya beban dan tanggung jawab yang besar terkait ketahanan nasional melalui kekuatan TNI dengan ketiga matranya," papar Sukamta.

Persoalan kedua, kebutuhan anggaran yang sangat besar berdasar keterangan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut perlu biaya 68 triliun rupiah untuk kembangkan lumbung pangan. Katanya biaya ini akan didapat dari pengajuan kredit ke Bank Indonesia dalam bentuk penerbitan obligasi.

"Yang jadi soal saat ini



Pemerintah sedang minim pemasukan, sementara kondisi ekonomi ke depan masih belum menentu. Opsi hutang akan semakin menambah beban hutang yang sudah membengkak. Mestinya pemerintah sedapat mungkin menekan pengeluaran hanya untuk kegiatan yang penting dan mendasak," tandasnya.

Persoalan yang ketiga, lanjutnya, soal komoditas singkong yang akan dikembangkan di lahan yang sedang disiapkan seluas 30 ribu hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas,

Provinsi Kalimantan Tengah.

"Saya kira lebih tepat jika Pemerintah saat ini menolong terlebih dulu para petani singkong. Berkali-kali petani alami anjloknya harga, seperti di bulan Juni kemarin harga 1 kg hanya 900 rupiah. Lebih baik pemerintah membuat pilot project industri untuk menyerap hasil panen singkong yang sudah ada, ini jelas akan menolong ribuan petani kita," terangnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Semakin Tak Terkendali, Mardani: Saatnya Evaluasi Kebijakan “New Normal”

“Pemanfaatan Datakrasi untuk memantau penyebaran Covid-19 sehingga sudah diterapkan oleh pemerintah, sehingga bisa lebih efektif dan menghindari penambahan lebih besar di tempat lain

## Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (15/07) — Inisiator Gerakan Kami Oposisi, Mardani Ali Sera minta Presiden Joko Widodo segera melakukan evaluasi kebijakan New Normal.

Mardani mengatakan hal tersebut lantaran ia melihat pelaksanaan di lapangannya tidak terkendali.

“Saya mendesak segera dievaluasi kebijakan New Normal. Saya kok melihat malah implementasi di lapangan pengaturan tidak berjalan sehingga melonjak terus penyebaran Covid-19,” kata Mardani, Rabu(15/07).

Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR itu juga mengatakan malah semakin

mengkhawatirkan buah dari kebijakan pelonggaran pengaturan penjagaan jarak, sehingga melahirkan klaster penyebaran baru.

“Kita baru di fase gelombang pertama tapi sudah muncul klaster baru, perumahan, Sekolah pendidikan asrama, pasar, dan lainnya,” ujar Mardani.

Jumlah kasus positif corona di Indonesia bertambah 1.282 menjadi 76.981 orang pada rilis data hari Senin (13/7). Sedangkan Provinsi DKI Jakarta masih menyumbang kenaikan kasus terbesar yakni 281 orang. Adapun Provinsi Jawa Timur tercatat

menyumbang 219 kasus.

Sedangkan pasien baru di Sulawesi Selatan bertambah 124 orang. Total ketiga wilayah ini menyumbang 624 atau 48,6% dari kenaikan angka corona hari ini.

Ketua DPP PKS itu minta selain evaluasi kebijakan, ia juga minta pembuatan kebijakan berdasarkan lebih mengedepankan berbasis ilmiah dan hasil riset.

“Menjadikan data dan temuan dari ilmuwan seharusnya di pilih oleh presiden, kalau perlu ketua gugus tugasnya di ganti akademisi virologi dan epidemiologi,” kata Mardani.

Selain itu, Mardani juga minta pemerintah mengedepankan datakrasi dalam penanganan penyebaran lebih jauh Covid-19.

“Pemanfaatan Datakrasi untuk memantau penyebaran Covid-19 sehingga sudah diterapkan oleh pemerintah, sehingga bisa lebih efektif dan menghindari penambahan lebih besar di tempat lain,” pungkasnya,





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**Habib Aboe Bakar Alhabsyi,**  
Anggota Komisi III DPR RI

Sebenarnya *political will* dari pemerintah dan integritas dari para aparat adalah kunci kesuksesan dari pemburuan para koruptor ini. Saya juga ingatkan akan pentingnya asset recovery, jangan sampai kita semangat memburu mereka namun tidak melakukan pengembalian asset negara. Tentunya ini bisa berdampak kantong negara semakin bolong

## Integritas Penegak Hukum Kunci Sukses Memburu para Koruptor

# Habib Aboe: Integritas Penegak Hukum Kunci Sukses Memburu para Koruptor

Bagaimana bisa sistem law enforcement kita seperti ini. Belum lagi kemampuan intel kita yang masih sangat rendah, menemukan Harun Mashiku yang ada di dalam negeri saja kita tidak bisa

## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (14/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy menyoroti kinerja penegak hukum yang belum optimal dalam menangkap buronan kelas kakap yang merugikan Negara.

"Kalau kita lihat tim pemburu koruptor yang sebelumnya kurang optimal. Setiap periode kepemimpinan sepertinya hanya mampu menangkap satu buron kelas kakap, bahkan terlihat ada yang tidak produktif," tegas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Misalkan saja, lanjut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, saat Basrief Arief memimpin selama 3 tahun, tim ini menangkap mantan Direktur Bank Sertivia David Nusa Wijaya yang menjadi tersangka kasus korupsi BLBI.

"Saat dipimpin Muchtar Arifin, TPK menangkap tersangka kasus BLBI Adrian Kiki Irawan. Saat dipimpin Abdul Hakim Ritonga, TPK dinilai loyo lantaran tak berhasil menangkap satupun target dan tak bisa membawa uang negara di luar negeri kembali", urai Habib Aboe.

Tentunya, kata Habib Aboe, hal ini perlu menjadi bahan evaluasi, apa kita mau mengulang lagi situasi tersebut. Sedangkan masih ada peluang untuk mengambil strategi lain dalam pemberantasan korupsi.

"Kalau kita lihat, problem pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ini sifatnya sistemik. Misalkan saja pada kasus Djoko Tjandra, sistem keimigrasian kita ternyata tidak mampu mendeteksi buron yang

keluar masuk Indonesia," tegas Bendahara Fraksi PKS ini.

"Sistem admin kita juga tidak terintegrasi, Djoko Tjandra bisa bikin e-KTP dengan mudah, bahkan didampingi lurah. Ini tentunya ada problem juga pada para aparatnya," imbuhnya.

Di sisi lain, katanya, ternyata status DPO dan Cekal terhadap Djoko Tjandra telah dihapus, tentunya ini permasalahan kronis.

"Bagaimana bisa sistem law enforcement kita seperti ini. Belum lagi kemampuan intel kita yang masih sangat rendah, menemukan Harun Mashiku yang ada di dalam negeri saja kita tidak bisa", tandasnya.

Intinya, imbuh Habib Aboe, sebenarnya political will dari pemerintah dan integritas dari para aparat adalah kunci kesuksesan dari pemburuan para koruptor ini.

"Saya juga ingatkan akan pentingnya asset recovery, jangan sampai kita semangat memburu mereka namun tidak melakukan pengembalian asset negara. Tentunya ini bisa berdampak kantong negara semakin bolong," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.



## Apresiasi Komitmen Kapolda Aceh

# Komisi III DPR Minta Bandar Narkoba Dihukum Berat

Kita memberikan apresiasi terhadap keseriusan Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada bersama jajarannya yang viral di medsos menyuarakan pemberantasan narkoba. Kita berharap keseriusan Kapolda Aceh ini dapat dilaksanakan para Kapolres di Aceh, guna membasmi peredaran narkoba di wilayah masing-masing

### H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI

Banda Aceh (19/07) — Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil, meminta kepada aparat penegak hukum agar memberikan hukuman yang berat terhadap bandar narkoba di Aceh.

“Kita memberikan apresiasi terhadap keseriusan Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada bersama jajarannya yang viral di medsos menyuarakan pemberantasan narkoba. Kita berharap keseriusan Kapolda Aceh ini dapat dilaksanakan para Kapolres di Aceh, guna

membasmi peredaran narkoba di wilayah masing-masing,” ujar Nasir Djamil kepada Serambi, Sabtu (18/7/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap agar perkara-perkara penyalahgunaan narkoba yang dilimpahkan aparat penegak hukum hingga diputuskan di Pengadilan Negeri (PN) agar dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Ketua Forbes DPR-DPD RI Asal Aceh ini mengatakan, pihaknya akan mengawasi

setiap putusan perkara narkoba di kabupaten/kota di Aceh. Bukan hanya itu, lembaga pemyarakatan juga akan terus diawasi. “Ini perlu dilakukan agar ada efek jera bagi bandar narkoba yang telah merusak generasi bangsa di Aceh, karena narkoba adalah musuh kita bersama,” jelasnya.

Selain itu, menurut Nasir Djamil, setiap perkara penyalahgunaan narkoba khususnya bagi bandar narkoba dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 6 sampai 20 tahun.

“Di sini perlu kejelian aparat penegak hukum untuk menganalisa barang bukti yang menjadi temuan, apakah memang pantas setiap perkara penyalahgunaan narkoba pelakunya sebagai pengedar narkoba atau hanya sebagai pemakai narkoba,” ujarnya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**OPINI**

Kamis 16 Juli 2020

**Djoko Tjandra dan  
Maria Pauline Lumowa**

# Quo Vadis Penegakan Hukum di Indonesia?

Oleh : **Drs. H. ADANG DARADJATUN**

Anggota Komisi III DPR RI / Wakilpolri 2004 - 2006



Djoko Tjandra dan Maria Pauline Lumowa,

# Quo Vadis Penegakan Hukum di Indonesia?

**Drs. H. ADANG DARADJATUN**

Anggota Komisi III DPR RI / Wakilpolri 2004 - 2006

Hukum di Indonesia ini sudah tertulis di atas kertas, bahwa negara kita adalah negara hukum. Hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandungi pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Tidak ada yang membantah itu,

termasuk para akademisi hukum.

Namun, publik kembali dipertontonkan sebuah peristiwa yang mencoreng nama Indonesia sebagai negara hukum. Djoko Tjandra, seorang buronan dan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, tiba-tiba secara mengejutkan sudah berada di Indonesia.

Hal ini berdasarkan keterangan Jaksa Agung ST

Pola kepemimpinan di negara ini memperlihatkan pemangku jabatan yang tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya. Kalau para pejabat itu amanah, mematuhi sistem dan tidak lalai, tidak mungkin buronan ini bisa lolos selama lebih dari 10 tahun sejak dia melarikan diri dari Indonesia.

Burhanuddin saat rapat dengan Komisi III DPR RI 29 Juni 2020. Padahal selaku terpidana yang vonis terhadapnya sudah in cracht, bahkan menjadi buronan luar negeri yang diincar Interpol, Djoko sudah seharusnya ditangkap dan dimasukkan ke balik jeruji. Sayangnya, ini tidak dilakukan.

## Djoko Tjandra dan Penegak Hukum

Penjelasan dari institusi negara sama sekali tidak memuaskan. Kemenkumham yang membawahi Imigrasi, mengaku tidak tahu kalau Djoko sudah berada di Indonesia. Alasannya, nama Djoko sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) tidak ada di sistem mereka.

Kejaksan mengaku bahwa intelijen mereka gagal mendeteksi keberadaan Djoko, yang ternyata disinyalir sudah ada di Indonesia pada 8 Juni 2020 untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Jakarta Selatan.

Kepolisian sendiri belum bisa menindak karena tidak ada



## SURAT JALAN DJOKO TJANDRA

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI)  
Boyamin Saiman menyerahkan surat jalan buron korupsi  
Djoko Tjandra ke Komisi III DPR RI, Selasa (14/7/2020).  
Sumber : Istimedia

# Djoko Tjandra dan Maria Pauline... hal 2



red notice dari pihak kejaksaan.

Bahkan Djoko masih sempat untuk mengurus E-KTP di kelurahan Grogol Selatan, dan tidak terdeteksi oleh pihak Kemendagri, maupun Disdukcapil DKI.

Padahal, dia sudah terdaftar sebagai warga negara Papua Nugini, tidak seharusnya dia memiliki E-KTP. Namun, ketika pihak kelurahan dan Disdukcapil ditanya, mereka lagi-lagi mengaku tidak tahu terkait status hukum Djoko Tjandra.

Dari sini, kita bisa melihat

bahwa sistem penegakan hukum negara kita gagal dan memalukan. Bayangkan saja, seorang buronan bisa mengecho empat institusi negara yang terhormat, Kemendagri, Kemenkumham, Kepolisian dan Kejaksaan. Catatan penting dalam penegakan Hukum

Kasus ini benar-benar merefleksikan wajah hukum yang buruk di negara kita.

Pola kepemimpinan di negara ini memperlihatkan pemangku jabatan yang tidak amanah dalam melaksanakan

kasus Djoko Tjandra ini memberikan efek buruk bagi kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Masyarakat menjadi distrust dan akhirnya bersikap acuh terhadap hukum itu sendiri. Institusi hukum tidak lagi dihormati dan ini akan mempersulit pemerintah kedepannya dalam menegakkan hukum dan keteraturan secara adil dan profesional, karena untuk melaksanakan itu, pemerintah memerlukan kepercayaan dari masyarakat.

tugasnya. Kalau para pejabat itu amanah, mematuhi sistem dan tidak lalai, tidak mungkin buronan ini bisa lolos selama lebih dari 10 tahun sejak dia melarikan diri dari Indonesia.

Dan tidak mungkin buronan ini bisa masuk dengan mudah ke negara kita, bahkan sampai membuat e-KTP tanpa ada gangguan. Ada pihak yang sengaja tidak mematuhi sistem yang telah disepakati bersama, sehingga buronan ini masih berkeliaran dengan bebas.

Selain itu, penegakan hukum kita sama sekali kurang

terorganisir dan terkoordinasi. Kita bisa melihat bagaimana pihak-pihak kementerian dan kejaksaan terlihat kebingungan untuk menjelaskan fenomena Djoko Tjandra.

Masing-masing pihak saling mengelak, mengaku tidak tahu, dan menolak bertanggung jawab. Terlebih lagi, buronan luar negeri seperti Djoko Tjandra bukanlah hal yang baru. Baru baru ini, Pelaku pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa, akhirnya berhasil dipulangkan (ekstradisi) ke Indonesia

setelah buron selama 17 tahun.

Dulu juga pernah ada koruptor raksasa yang kabur ke Kolombia. Namun, berkat penegakan hukum yang cepat, tepat dan terkoordinasi dengan baik, buronan itu bisa ditangkap dan dipulangkan untuk disidang di Indonesia. Lalu, kenapa ini tidak terjadi pada kasus Djoko Tjandra?

Selain itu, kasus Djoko Tjandra ini memberikan efek buruk bagi kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Masyarakat menjadi distrust dan akhirnya bersikap acuh terhadap hukum itu sendiri. Institusi hukum tidak lagi dihormati dan ini akan mempersulit pemerintah kedepannya dalam menegakkan hukum dan keteraturan secara adil dan profesional, karena untuk melaksanakan itu, pemerintah memerlukan kepercayaan dari masyarakat.

Pada akhirnya, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Bung Karno, penegakan hukum hanya akan terjadi tergantung dari semangat para penyelenggara negara. Seperti apakah semangat itu? Yakni, semangat untuk menciptakan keadilan, good governance yang dilandasi oleh profesionalitas, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**drh. H. Slamet**

Anggota Komisi IV DPR RI

Tak penting siapa penyebab karhutla ini. Besar atau kecil, perorangan atau korporasi harusnya pemerintah bertindak tegas bagi penyebab karhutla,

# Anggota FPKS Kritisi Sulitnya Penegakan Hukum Kasus Kebakaran Hutan Liar

# Anggota Fraksi PKS Kritisi Sulitnya Penegakan Hukum Kasus Kebakaran Hutan Liar

Tak penting siapa penyebab karhutla ini. Besar atau kecil, perorangan atau korporasi harusnya pemerintah bertindak tegas bagi penyebab karhutla,

## **drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (21/07) — Komentar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya terkait tidak mudahnya memproses hukum para pelaku pembakaran hutan dan lahan, mengundang reaksi keras dari Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Slamet.

“Yang membuat tidak mudah apa ? Kalo regulasi yang membuat tidak mudah, rubah saja,” ujar anggota komisi IV DPR RI Slamet kepada media.

Slamet menjelaskan selama perubahan regulasi untuk kepentingan negara dan rakyat, maka pihaknya sebagai anggota DPR RI akan support.

Namun demikian, lanjut anggota DPR RI dari Dapil IV Jabar ini, kalau tidak mudahnya karena ada intervensi kekuasaan, maka sepatutnya pihaknya mengingatkan para penguasa.

“Tidak selamanya anda berkuasa, ada masanya harus pensiun dan akan diminta pertanggung jawaban baik kepada rakyat maupun Tuhan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Slamet, pihaknya berharap para penguasa segera sadar.

“Maka sadarlah para penguasa, abdikan kekuasaan anda untuk rakyat dan negara, maka anda akan dicatat dalam

sejarah bahwa anda adalah pahlawan,” cetusnya.

Slamet menjelaskan, sikap yang sama juga harus dilakukan baik buat perorangan maupun korporasi yang terlibat dalam karhutla.

Sebab, lanjut dia, masalah kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah bersama dan harus jadi atensi.

“Tak penting siapa penyebab karhutla ini. Besar atau kecil, perorangan atau korporasi harusnya pemerintah bertindak tegas bagi penyebab karhutla,” tandasnya.



## Menhan Rasa Mentan

# Anggota FPKS: Salah Kaprah Penerapan Ketahanan Pangan

Jangan sampai kekuatan politik mendominasi dalam kebijakan untuk menabrak sebuah pakem. Politik yang santun dan berwibawa mesti di terapkan untuk membangun suasana yang baik dan kondusif dalam negara kita

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (13/07) — Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima penugasan dari Presiden Jokowi untuk membangun Lumbung Pangan Nasional atau food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dengan penugasan kepada Kemenhan, selanjutnya Prabowo bisa melibatkan TNI untuk membangun food estate di Kalteng.

Namun, tugas tersebut bukannya tanpa kritik. Anggota Komisi IV Fraksi PKS Andi Akmal bingung mengapa pengelolaan ketahanan pangan diberikan kepada Kemenhan, bukan Kementan yang berwenang mengurus pangan.

Menurut Akmal, Kementan dipandang memiliki sumberdaya manusia yang lebih tepat untuk pengembangan lumbung pangan nasional di Kalteng.

"Yang punya SDM bidang pertanian kan Kementan. Sehingga kalau Kemenhan yang diberikan tugas, tentu agak sulit dipahami," kata Andi Akmal.

Politisi asal Sulawesi Selatan II ini menyarankan kepada pemerintah jangan sampai memahami arti yang salah penerapan di lapangan.

Akmal memberi contoh kita mengenal istilah food security. Sedangkan secara terjemah baku security yang berarti keamanan.

"Jangan lantas food security di implementasikan ketahanan pangan yang bertanggungjawab Menteri Pertahanan", ketus Akmal.

Anggota DPR Komisi IV ini menanggapi klaim pemerintah bahwa permasalahan ketahanan pangan ada hubungannya dengan Kementerian pertahanan yang berarti urusan nilai tukar, bensin solar dan seni budaya bisa juga diurus Menhan.

"Ada ketahanan finansial, ketahanan energi yang bisa di klaim menteri pertahanan. Bahkan urusan kesehatan yang saat ini sedang musibah akibat berkurangnya ketahanan kesehatan juga bisa diklaim Menhan," ujarnya.

Ungkapan syair yang diungkapkan Akmal ini merupakan upaya masukan kepada Pemerintah agar semakin baik dalam mengelola negara dengan SDM yang tepat.

"Jangan sampai kekuatan politik mendominasi dalam kebijakan untuk menabrak sebuah pakem. Politik yang santun dan berwibawa mesti di terapkan untuk membangun suasana yang baik dan kondusif dal-



am negara kita", pungkasnya.

Akmal melanjutkan, secara SDM dan pengalaman, logika awam akan mengarah bahwa leading sektor bidang pangan ini di Kementerian Pertanian. yang tampak adalah, SYL memang orang baru di Kementan.

Menurut Akmal, SYL memang orang baru di Kementan, tapi beliau memiliki pengalaman 10 Tahun Gubernur Sulawesi Selatan dan

berhasil menjadikan daerah Lumbung Pangan.

"Saya menyarankan, kondisi yang tidak ideal pada wabah ini, jangan semakin diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Rakyat bisa melihat dan menilai. Jangan pemerintah ini terlihat semakin lucu dan tidak berwibawa", tutup Andi Akmal Pasluddin.

# Legislator PKS: Membangun Pengembangan Potensi Ikan, Jadi Solusi Pangan Indonesia

Saya tidak terlalu mempersoalkan pemerintah menunjuk siapa koordinator food estate. Yang menjadi persoalan adalah, jangan sampai uang negara berhamburan tanpa bekas nantinya karena kegagalan memilih orang dan eksekusi kebijakan.

## Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (13/07) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin menanggapi ditunjuknya Menteri Pertahanan sebagai leading sector untuk memperkuat food estate dengan target 700 ribu hektare.

Hamid memberi pertanyaan besar, apakah selama ini kita sudah tepat menjadikan beras sebagai pangan primer untuk memenuhi kebutuhan nasional ?

"Ide ini muncul dari inspirasi pakar ekonomi kelembagaan yang pernah berdiskusi dengan saya. Mereka mempertanyakan, selama ini hanya sedikit waktu kita menikmati

surplus hingga ekspor beras," ungkap Hamid.

Hanya sekitar 2 tahun saja, lanjutnya, antara 1984 sampai dengan 1986 kita secara kenyataan memang surplus beras. Baru pada 1985, Indonesia memulai untuk ekspor beras. Ekspor pertama kali ke Vietnam dengan jumlah 100 ribu ton beras. Meski hanya mampu bertahan sampai tahun 1986.

"Berbagai versi Indonesia surplus beras, ekspor beras dan berbagai argumen, itu tidaklah sesuai kenyataannya. Terbukti setiap tahun kita impor beras tanpa henti. Hanya 2 tahun saja

murni tanpa impor. Kita Harus mempertanyakan, apakah beras ini solusi inti untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan kita?", ucap Hamid mempertanyakan.

Hamid mengatakan, paparan bentangan air yang menutup bumi Indonesia ini jauh lebih luas dari daratan. Seharusnya ini menjadi sinyal bahwa yang hidup di air merupakan sebuah potensi menyuplai kebutuhan pokok pangan seluruh penduduk Indonesia. Ide beberapa ilmuwan yang menyarankan untuk Indonesia memperkuat perikanan baik tangkap maupun budidaya mesti menjadi pertimbangan kuat dalam penyusunan kebijakan pangan nasional. Menjadikan Ikan sebagai kebutuhan primer, dan beras sebagai sekunder merupakan ide out of the box, tapi ini merupakan solusi menarik untuk merubah pola kehidupan masyarakat Indonesia.

"Protein dari ikan ini kan sangat tinggi, selain menjadikan rakyat Indonesia semakin cer-



das, juga akan menjadi perlakuan kuat terhadap ancaman stunting. Belum lagi negara kita akan menjadi Lumbung Pangan yang benar-benar bukan pencitraan", kata Hamid.

Legislator asal Jawa Tengah IV ini melihat tidak dilibatkannya Kementerian dalam beberapa kebijakan besar terkait pangan merupakan kesalahan besar pemerintah yang pertama.

"Tapi kesalahan utamanya adalah tidak membangun integrasi membangun kedaulatan pangan yang melibatkan seluruh lembaga besar untuk mewujudkannya karena saling kait mengkait," ujarnya.

Hamid melanjutkan, KKP,

Kementan, Kemenhut LH, kemenprin, PU, LIPI, merupakan lembaga-lembaga besar yang bila bersinergi akan mewujudkan seluruh infrastruktur kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir.

"Saya tidak terlalu mempersoalkan pemerintah menunjuk siapa koordinator food estate. Yang menjadi persoalan adalah, jangan sampai uang negara berhamburan tanpa bekas nantinya karena kegagalan memilih orang dan eksekusi kebijakan. Amanat Rakyat ini sangat berat pertanggungjawabannya di masa depan", tutup Hamid Noor Yasin.

## Banyak Korban ABK WNI di Kapal Nelayan China

# Aleg PKS Desak Presiden Layangkan Nota Protes

Kematian ABK WNI di kapal nelayan China sudah terjadi berulang kali. Sudah saatnya Presiden memberikan perhatian serius, salah satunya dengan melayangkan nota protes terkait hal ini kepada Pemerintah China

### **Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (15/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, mendesak Presiden Joko Widodo agar mengirimkan nota protes kepada Pemerintah China atas berlanjutnya kekerasan terhadap anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di kapal nelayan China.

Hermanto mengatakan kekerasan terakhir mengakibatkan tewasnya Hasan Afriandi, nelayan asal Lampung akibat penyiksaan oleh mandor kapal nelayan berbendera China Lu Huang Yuan Yu 118.

"Kematian ABK WNI di kapal nelayan China sudah terjadi berulang kali. Sudah

saatnya Presiden memberikan perhatian serius, salah satunya dengan melayangkan nota protes terkait hal ini kepada Pemerintah China", papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya.

"Dengan pengiriman nota protes tersebut diharapkan kejadian kematian yang sangat mengerikan seperti dialami oleh Hasan Afriandi tidak terjadi lagi di kemudian hari", tambah legislator Fraksi PKS ini.

Diberitakan, Hasan Afriandi mengalami penyiksaan yang tidak berperikemanusiaan sampai akhirnya meninggal. Jasadnya lalu disimpan dalam freezer penyimpanan ikan.

"Saya mengapresiasi

kinerja aparat yang berhasil menemukan jenazah Hasan. Kalau aparat tidak menemukan, sangat mungkin jenazah tersebut akan dibuang di laut internasional seperti yang pernah terjadi sebelumnya", tuturnya.

"Ungkap kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Jatuhkan hukuman yang setimpal atas semua pelakunya", tandas legislator dari dapil Sumbang I ini.

Sebelumnya, awal Mei lalu diberitakan 3 jenazah ABK WNI dibuang ke laut dari kapal nelayan berbendera China. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, M. Abdi Sufuh menginformasikan dalam periode November 2019 - Juni 2020 tercatat 30 orang awak kapal Indonesia menjadi korban kekerasan saat bekerja di kapal nelayan China.

Kejadian tersebut mengakibatkan tujuh orang ABK meninggal dunia, tiga orang hilang dan 20 orang lainnya dalam Kondisi selamat.



AHMAD SYAIKHU



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Ahmad Syaikhul Huda (Anggota DPR RI Jawa Barat VII  
daerah pemilihan Purwakarta)

**H. Ahmad Syaikhul Huda**  
Anggota Komisi V DPR RI

Ada beberapa temuan BPK yang perlu disoroti, karena menyangkut kinerja lembaga. Kepada Kementerian PUPR, Syaikhul menyoroti revaluasi aset di atas Rp 5 Miliar, sehingga terjadi kenaikan aset di Kementerian PUPR dari Rp 915 Triliun menjadi Rp 1.896 T. Dengan kenaikan tersebut ada pajak yang harus dibayarkan oleh kementerian PUPR sebesar Rp 98,1 Triliun. Kenaikan aset setelah revaluasi ini sangat signifikan. Harusnya ada pajak yang dibayarkan Kementerian PUPR

Banyak Temuan BPK  
**Syaikhul  
Pertanyakan  
Kinerja Tiga  
Kementerian**

## Banyak Temuan BPK

# Syaikhu Pertanyakan Kinerja Tiga Kementerian

Saya mengapresiasi raihan WTP dari BPK. Pada kementerian perhubungan dan Kementerian Desa PDTT opininya sudah ajeg dalam beberapa tahun. Mudah-mudahan kementerian PUPR ke depan bisa terus mempertahankan opini WTP. Terimakasih atas perjuangannya.

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (16/07) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu mempertanyakan kinerja tiga Kementerian. Pasalnya, banyak temuan yang didapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tiga kementerian tersebut yakni, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Syaikhu menyampaikan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II Tahun 2019 BPK RI.

Di awal, Politisi PKS itu mengapresiasi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh ketiga Kementerian tersebut.

"Saya mengapresiasi raihan WTP dari BPK. Pada kementerian perhubungan dan Kementerian Desa PDTT opininya sudah ajeg dalam beberapa tahun. Mudah-mudahan kementerian PUPR ke depan bisa terus mempertahankan opini WTP. Terimakasih atas perjuangannya," kata Syaikhu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (15/07/2020).

Tapi menurut Syaikhu, ada

beberapa temuan BPK yang perlu disoroti, karena menyangkut kinerja lembaga. Kepada Kementerian PUPR, Syaikhu menyoroti revaluasi aset di atas Rp 5 Miliar, sehingga terjadi kenaikan aset di Kementerian PUPR dari Rp 915 Triliun menjadi Rp 1.896 T. Dengan kenaikan tersebut ada pajak yang harus dibayarkan oleh kementerian PUPR sebesar Rp 98,1 Triliun.

"Kenaikan aset setelah revaluasi ini sangat signifikan. Harusnya ada pajak yang dibayarkan Kementerian PUPR," jelas Syaikhu.

Kepada Kemendes dan PDTT, Syaikhu berharap lembaga tersebut memperkuat sistem pengendalian intern untuk dapat menjamin keandalan proses administrasi. Dia juga mempertanyakan kendala-kendala yang dihadapi oleh kementerian dalam menyelesaikan temuan. Sebab, temuan yang dapat dituntaskan baru 42,22 %. Demikian pula dengan temuan tahun 2015 yang masih outstanding.

"Ini rendah sekali. Masih



dibawah 50% tindak lanjut temuan BPK. Apa masalah dan kendalanya. Coba terbuka kepada kami," kata Syaikhu.

Kepada Kementerian Perhubungan, Syaikhu mempertanyakan temuan strategis BPK, terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kewajiban penerbitan SRUT pada APM 23 merek tahun 2017 sebanyak 5.987.772 unit kendaraan bermotor. Nilainya sebesar Rp 683.751.900.000. Per Juni 2020 jumlah rekapitulasi piutang yang telah terbayar baru 149.187.950.000 atau sebesar 21,82 %.

"Piutang yang terbayar sangat rendah. Padahal di saat pemerintah butuh dana, pemasukan PNBP ini harus digenjut seoptimal mungkin," ujarnya.

Syaikhu juga menyoroti trend kenaikan jumlah temuan

maupun nilainya dari semester I ke Semester II. Jumlah rekomendasi ada 1026, naik menjadi 1.049. Nilai rekomendasi juga naik dari Rp 2,31 Triliun menjadi Rp 2,99 Triliun. Artinya, ada akumulasi temuan yang belum ditindaklanjuti.

"Jika kondisi seperti ini terus menerus maka bisa dipastikan akumulasi temuan akan semakin besar. Ini tidak boleh dibiarkan," tegas Syaikhu.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya lima penyebab terjadinya temuan, yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan kelemahan sistem pengendalian intern.

"Temuan-temuan ini harus secepatnya ditindaklanjuti," pungkas Syaikhu.



# Legislator PKS: RUU Omnibus Law Cipta kerja Berpotensi Rampas Pendapatan Daerah

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, banyak perijinan di sektor transportasi yang kembali ditarik ke pusat. Seperti perijinan bengkel umum, angkutan umum, ijin usaha angkutan laut. Bahkan, sampai urusan perijinan lahan parkir juga akan diambil alih pusat

## Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Surabaya (19/07) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Sigit Sositomo menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi merampas pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini didapat dari sejumlah perijinan.

Hal ini disampaikan Sigit menyusun pengambilalihan sejumlah perijinan yang sejak otonomi dikelola daerah dan akan menjadi kewenangan pusat dalam RUU Amnibus Law Cipta Kerja.

"Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, banyak perijinan di

sektor transportasi yang kembali ditarik ke pusat. Seperti perijinan bengkel umum, angkutan umum, ijin usaha angkutan laut. Bahkan, sampai urusan perijinan lahan parkir juga akan diambil alih pusat." Kata Sigit.

Pengambilalihan sejumlah perijinan itu dinilai akan merugikan daerah dan membuat daerah akan sulit mandiri dari sisi keuangan karena potensi PAD-nya diambil alih oleh pusat.

Disisi lain, pengambilalihan perijinan dari pemda ke pusat akan menambah beban

kerja pusat dan mempersulit proses perijinan karena rentang kendali wilayah Indonesia yang sangat luas.

"Pengambilalihan kewenangan pemda dalam sejumlah perijinan berpotensi melanggar UU NO.23/2018 tentang Pemda. Dalam lampiran UU Pemda, kewenangan perijinan lahan parkir, bengkel umum dan angkutan umum merupakan kewenangan pemda. Dan jika penerbitan ijin dikelola oleh pusat akan menyulitkan (Meski dilakukan online) karena rentang kendali yang sangat luas mengingat ada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang tersebar di 17 ribu pulau. Dan fasilitas publik setiap daerah tidak merata bahkan masih ada yang belum terjangkau internet." "kata Sigit, anggota FPKS dapil 1 Jawa Timur.

Seperti diketahui, dalam Paragraf 10 RUU Cita Kerja, pemerintah mengusulkan perubahan 4 UU disektor transportasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Adapun perijinan di sektor transportasi kewenangan pemda yang akan kembali ditarik ke pusat antara lain ijin angkutan umum, ijin lahan parkir, ijin bengkel umum dan ijin angkutan laut.

Banyaknya pasal-pasal kontroversial dalam RUU Cipta Kerja itu, kata Sigit, menyebabkan fraksinya keberatan membahas lebih lanjut RUU Cipta Kerja terlebih dimasa pandemi covid-19 dan meminta penundaan pembahasannya

sampai Presiden Republik Indonesia secara resmi mengumumkan wabah COVID 19 telah berakhir di Indonesia.

"Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang terdiri dari 174 Pasal 1029 halaman merupakan RUU yang perlu mendapatkan perhatian dan konsentrasi penuh. Namun saat ini, Bangsa Indonesia dan juga pemerintah sedang menghadapi persoalan yang amat serius yaitu persoalan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Disisi lain, adanya kontroversi, stigma negatif dan penolakan masyarakat luas atas RUU ini. Karena itu, sebaiknya pembahas RUU ini ditunda," Kata Sigit.

# Legislator PKS: Dana Pinjaman untuk BUMN Lebih Mendidik Ketimbang PMN

“Fraksi PKS mendesak agar mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana talangan untuk BUMN dilakukan secara ketat berkala agar tepat sasaran dan BUMN mampu mengembalikan dana rakyat tersebut

## **AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (16/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin, Ak. menanggapi dana talangan (dana pinjaman) untuk PT Garuda (Perseo) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Menurut Amin, pihaknya mengaku menyetujui dana talangan tersebut dengan syarat skema pengembalian dana yang jelas dalam jangka waktu lima tahun.

Pemberian dana pinjaman lebih mendidik agar BUMN bertanggung jawab terhadap dana rakyat ketimbang dana pernyataan modal negara (PMN) yang tidak memerlukan

pengembalian. Hal itu disampaikan Ketua Poksi VI DPR RI, Amin Ak yang tampil menjadi juru bicara dalam pandangan Fraksi PKS terkait dana talangan dan PMN untuk BUMN di Gedung DPR, Rabu (15/07/2020).

“Dana talangan untuk BUMN perlu diatur secara jelas dalam norma peraturan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia. Ini menjadi bagian penting karena BUMN Perseo yang mendapatkan dana talangan tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara,” ungkap Amin.

Amin menambahkan, Fraksi PKS menyetujui dana talangan untuk PT Garuda Indonesia (GAI) untuk menyelamatkan satu-satunya perusahaan penerbangan nasional yang dimiliki bangsa Indonesia, dengan syarat manajemen baru Garuda Indonesia merealisasikan good corporate governance agar kasus yang menimpa Garuda bisa segera diselesaikan.

“Tingginya angka proporsi fixed cost terhadap total cost yaitu 46%, turunnya pendapatan akibat Covid-19, dan kewajiban pinjaman yang jatuh tempo bisa berdampak buruk bagi Garuda,” ujar Amin. Sementara itu, lanjutnya, Fraksi PKS mengapresiasi kinerja angkutan barang KAI yang masih menunjukkan pertumbuhan hingga April 2020 dan menjadi support bagi pendapatan keseluruhan KAI, ditengah menurunnya pendapatan angkutan penumpang akibat kebijakan pembatasan sosial.

Meski demikian, katanya,



tetap perlu diwaspadai potensi penurunan pendapatan angkutan barang sepanjang 2020 ini akibat berkurangnya permintaan karena menurunnya produktivitas Industri.

“Skema dana talangan yang akan diberikan kepada KAI ini sangat mudah dengan instrumen soft loan dan tingkat bunga yang sangat rendah yaitu 2% - 3%. Karena itu, pendanaan sebesar Rp3,5 T untuk KAI ini harus digunakan secara tepat volume dan tepat sasaran sesuai peruntukannya”, urainya.

Sedangkan terkait dengan

dana talangan untuk Perum Perumnas, Amin menambahkan, Fraksi PKS mendorong Perum Perumnas untuk menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Fraksi PKS mendesak agar mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana talangan untuk BUMN dilakukan secara ketat berkala agar tepat sasaran dan BUMN mampu mengembalikan dana rakyat tersebut,” pungkas Amin.

Peringati Hari Koperasi Nasional

# Aleg PKS: Pemerintah Perlu Serius Kembangkan Koperasi Syariah

Induk koperasi di Finlandia memberikan dukungan kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (SDM) bagi koperasi yang menjadi anggotanya, dengan cara mendirikan lembaga riset dan pelatihan yang dapat membantu koperasi bisa berkembang

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (13/07) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, pada momen Hari Koperasi yang selalu diperingati pada 12 Juli di Indonesia mendorong pemerintah agar memperbesar perannya pada pengembangan koperasi syaria'ah. 73 tahun sudah Indonesia memperingati Hari Koperasi Nasional (HARKOPNAS).

Nevi mengatakan, sejak di-deklarasikan pada 12 Juli 1947, pada kongres koperasi pertama kali di Tasikmalaya, selalu

terjadi pasang-surut di industri perkoperasian Indonesia.

"Mulai dari persoalan pertumbuhan jumlah unit dan anggota koperasi, sampai dengan adanya pembatalan payung hukum perkoperasian mewarnai perjalanan koperasi di tanah air," ungkapnya.

Merujuk data yang diolah Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Legislatif asal Sumatera Barat II ini memaparkan bahwa kontribusi koperasi hingga Juni 2019 mencapai 5,1% terhadap PDB

Indonesia.

"Namun sayangnya pencapaian prestasi kontribusi koperasi terhadap PDB tidak sebanding dengan kenaikan jumlah unit koperasi," imbuh Nevi.

Nevi melanjutkan, bila dibandingkan dengan tahun 2014 dimana koperasi ada 210.000 unit, di tahun 2020 jumlah koperasi berkurang menjadi sekitar 126.000 unit.

"Perlu perhatian Pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lagi koperasi di Indonesia yang berkualitas. Tujuan utamanya agar kontribusi koperasi terhadap pdb bisa lebih tinggi lagi sehingga bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional." ujar Anggota Komisi VI Fraksi PKS ini.

Nevi melanjutkan, bahwa Koperasi saat ini juga dipraktikkan pada berbagai negara di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Organisasi Koperasi Internasional (Internasional Cooperative Alliance/ICA), pada



Juli 2019 ada 3 juta badan usaha koperasi di dunia saat ini dengan anggota individu 1,2 miliar orang. Selain itu koperasi juga mempekerjakan 280 juta orang di seluruh dunia, atau 10% dari angkatan kerja global.

"Kita perlu mengetahui bahwa pendapatan dari 300 koperasi top dunia dapat mencapai US\$ 2,1 triliun, atau setara kekuatan ke-6 ekonomi dunia. Di beberapa negara maju seperti di Uni Eropa (UE) dan AS koperasi sudah menjadi besar di sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan kapitalis", katanya.

Menurut Nevi, salah satu negara di Eropa yang memiliki koperasi paling maju adalah

Finlandia, dimana 84% dari 5,4 juta penduduknya adalah anggota koperasi dan mampu menyumbang 10% dari PDB negara.

Jika di Indonesia lanjutnya, ada Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai induk gerakan koperasi di Indonesia ada Pallervo Society sebagai induk gerakan koperasinya.

"Induk koperasi di Finlandia memberikan dukungan kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (SDM) bagi koperasi yang menjadi anggotanya, dengan cara mendirikan lembaga riset dan pelatihan yang dapat membantu koperasi bisa berkembang," ujar Nevi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Digitalisasi Nozel Molor

# Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Tidak Serius!

Ini kan keterlaluan molornya. Pemerintah seperti tidak bersungguh-sungguh untuk menanggulangi masalah kebocoran BBM bersubsidi melalui penerapan digital nozel. Padahal kerugian negara akibat kebocoran migas diprediksi Pertamina mencapai Rp 30 triliun setiap tahun

### Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (15/07) – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menilai Pemerintah tidak serius melaksanakan program digitalisasi nozel BBM.

Digitalisasi nozel adalah program penggantian alat salur BBM dari dispenser ke kendaraan, dari yang manual ke nozel digital. Dengan nozel digital ini BBM yang dikeluarkan dapat diketahui disalurkan ke kendaraan mana saja.

Program digitalisasi nozel di 5.518 SPBU yang ditargetkan selesai 31 Desember 2018, namun faktanya hari ini baru terealisasi sebesar 31%. Padahal target tersebut sudah direvisi sebanyak 5 kali.

"Ini kan keterlaluan molornya. Pemerintah seperti

tidak bersungguh-sungguh untuk menanggulangi masalah kebocoran BBM bersubsidi melalui penerapan digital nozel. Padahal kerugian negara akibat kebocoran migas diprediksi Pertamina mencapai Rp 30 triliun setiap tahun," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Dalam revisi ke-5, program digitalisasi nozel ini ditargetkan tuntas bulan Agustus 2020. Tapi melihat implementasinya baru 30% Mulyanto memperkirakan target tersebut tidak akan selesai di bulan yang ditentukan.

"Menurut saya sudah saatnya Deputy Pencegahan KPK turun langsung ke masalah ini, karena ini simpul yang strategis untuk menekan kerugian nega-

ra karena kebocoran migas. Jangan sampai terkesan Pemerintah melakukan tindakan pembakaran terhadap oknum-oknum yg menikmati kebocoran BBM," ujar mantan Irjen Kementerian zaman Presiden SBY ini.

Mulyanto menambahkan di tengah pandemi Covid-19, dimana keuangan negara semakin tertekan, Pemerintah perlu melakukan efisiensi keuangan, salah satunya dengan menanggulangi kebocoran BBM.

Pemerintah jangan anggap remeh program digitalisasi nozel ini. Dengan penggunaan nozel digital ini Pemerintah dapat memantau efisiensi dan efektifitas penyaluran subsidi BBM yang nilainya sangat besar.

"Pemerintah harus bertindak tegas, kalau memang serius. Tenggat waktu implementasi program ini kurang dari sebulan lagi. Kalau kemudian mundur lagi patut diduga ada pihak tertentu di Pemerintah yang tidak ingin program ini terlaksana. Bisa jadi pihak tersebut bagian dari penikmat kebocoran anggaran subsidi BBM," tandas Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS.



## Kemenag Anggarkan 2,5 T untuk Pesantren

# Iskan: Kami sudah Suarakan Sejak Awal

“Kami sudah suarakan hal ini dari awal, bahkan di raker terakhir Komisi VIII dengan Kemenag (26/06/2020) lalu, agar usulan tambahan anggaran 2020 digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pesantren dan pendidikan keagamaan yang terdampak Covid-19

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (18/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, menanggapi kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang menyiapkan anggaran bantuan sebesar Rp. 2,5 Triliun untuk mendukung aktivitas pendidikan pesantren di masa pandemi.

Menurut Anggota Komisi VIII ini, bantuan tersebut tentunya diharapkan dapat mensupport semua kegiatan pesantren khususnya di era new normal.

“Kami sudah suarakan hal ini dari awal, bahkan di raker terakhir Komisi VIII dengan Kemenag (26/06/2020) lalu, agar usulan tambahan

anggaran 2020 digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pesantren dan pendidikan keagamaan yang terdampak Covid-19,” ujarnya.

Selama kurang lebih 4 bulan, lanjut Iskan, pesantren di beberapa wilayah Indonesia tidak bisa menjalankan aktifitas belajar dan mengajar dikarenakan pandemi virus corona yang melanda di Indonesia.

“Jadi bantuan sebesar apapun saat ini sangat dibutuhkan, terkhusus pesantren-pesantren di Indonesia yang akan memulai aktifitasnya kembali,” terang Iskan.

Nantinya, lanjut Iskan,

penyaluran bantuan pondok pesantren akan dikategorikan dari jumlah santri. Untuk 500 santri ke bawah masuk golongan pesantren kecil, 500-1.500 santri kategori sedang dan di atas 1.500 itu kategori besar dengan nilai bantuan berbeda-beda di setiap kategori pesantrennya.

“Apa yang dilakukan Kemenag selaku pemerintah dalam hal ini merupakan perwujudan dari UU Pesantren itu sendiri, dia (UU pesantren) dibuat dan diundangkan untuk membantu pesantren, baik yang tradisional, modern, maupun yang memadukan antara ilmu Agama dengan umum. Apalagi secara nyata banyak pesantren yang terdampak di masa covid-19, (sehingga) kehadiran UU ini makin relevan dan penting serta tanggung jawab pemerintah selaku pelaksana UU” papar iskan.

Menurutnya, Hal ini juga tercantum dalam Pasal 42 UU Pesantren yang mengamanatkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja



sama program, fasilitas kebijakan dan pendanaan.

Selain itu, ada pula Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, dengan dukungan berupa (a) bantuan keuangan, (b) bantuan sarana dan prasarana, (c) bantuan teknologi, dan/atau (d) pelatihan keterampilan.

Legislator asal Sumatera utara ini menyambut baik program yang sudah dianggarkan ini dan berharap segera terealisasi sampai ke semua titik pesantren yang dituju.

“Semoga bantuan ini se-

gera terealisasi, agar kegiatan pembelajaran di pesantren-pesantren, itu bisa segera berjalan lancar sesuai dengan protokol Covid-19,” tandasnya.

Bantuan ini, kata Iskan, merupakan bantuan operasional, pesantren dapat memanfaatkannya untuk dapat membiayai pengeluaran operasional hariannya.

“Yang terpenting dapat dilakukan pengadaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan pesantren dalam pemenuhan protokol kesehatan di pesantren tersebut. Juga bisa dapat membiayai test kesehatan (rapid/swab PCR) bagi ustadz dan para santri di pesantren yang terpapar Covid-19,” tutup Iskan.

# Bukhori Desak Mensos Awasi Distribusi Bantuan Sembako Sampai ke Hilir

Mensos harus segera turun ke bawah untuk mengawasi kinerja jajarannya di lapangan, khususnya sampai di tingkat KPM. Saya meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti dan diusut tuntas agar tidak terus membebani masyarakat yang sudah sulit ini

## **KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendesak Menteri Sosial untuk mengawasi penyaluran bantuan sembako sampai di tingkat paling hilir, yakni keluarga penerima manfaat (KPM).

Desakan tersebut disampaikan oleh Bukhori dalam rangka menindaklanjuti laporan yang diterimanya terkait ulah sejumlah oknum pejabat di daerah yang ditenggarai melakukan penyelewengan terhadap bantuan sembako tersebut.

"Saya mendapat laporan bahwa masih saja ada yang 'bermain' di tengah situasi sulit. Sebenarnya, per-KPM itu

memperoleh bantuan senilai Rp 200.000,- supaya bisa membeli sejumlah item sembako sebagaimana sudah diatur dalam pedoman. Namun, ada sebagian oknum pejabat di daerah tertentu yang melakukan penyelewengan dengan memainkan domain item dari sembako tersebut" ungkapnya di Jakarta, Senin (13/07/2020)

Bukhori memaparkan, penyelewengan tersebut dilakukan dengan cara mengharuskan kepada agen (e-warong) yang ditunjuk oleh otoritas setempat untuk menggunakan daging beku seberat setengah kilogram

seharga Rp 60.000,- sebagai salah satu item sembako bagi KPM. Sedangkan sisanya, senilai Rp 140.000,- dialokasikan untuk beras dan sayur mayur.

Disamping itu, Bukhori juga mencermati bahwa porsi protein tidak harus ditetapkan secara rigid sebesar ½ kg daging. Menurutnya, apabila porsi protein tersebut bisa dikurangi, maka sisanya bisa dialokasikan lebih banyak untuk porsi sayur dan beras bagi KPM.

"Masalahnya adalah tidak semua KPM mengonsumsi daging. Sebagian besar KPM bahkan cenderung memilih telur maupun daging ayam karena harganya lebih terjangkau. Padahal, jika tidak dipaksa untuk membeli daging beku, sebenarnya sisa dari bantuan tersebut cukup besar untuk digunakan membeli bahan pangan yang lebih penting, seperti beras misalnya," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PKS ini mengkritisi dari segi regulasi terkait penetapan sepihak yang dilakukan oknum pejabat tersebut. Dalam Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 hal. 43-44 dijelaskan bahwa E-Warong tidak boleh menjual



bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang telah ditentukan sepihak atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan. Jika terbukti melanggar, E-Warong tersebut akan dicabut izinnnya oleh Bank Penyalur.

"Masih mengacu pada pedoman, bisa juga dibaca di halaman 81 terkait Pemanfaatan Dana Bantuan, pada poin (b) disebutkan bahwa

KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako. Nah, jika kasusnya adalah sudah terlanjur dipatok oleh agen (atas arahan oknum pejabat), sudah jelas melanggar hak dari KPM sekaligus melanggar regulasi yang sudah diatur," ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Saatnya Gotong Royong Lawan Pandemi

Saat ini seluruh bangsa sedang dihadapkan pada masa sulit yang mengharuskan untuk bergerak bersama menghadapi pandemi Covid-19. Seluruh dunia dihadapkan pada berbagai perubahan social dan ekonomi yang begitu cepat. Meskipun demikian, kita berusaha tidak boleh kalah dengan keadaan

## H. ANSORY SIREGAR, Lc,

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Tangerang Selatan (17/07) — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengimbau agar semua pihak untuk terus taat dan mematuhi protokol kesehatan agar tetap produktif dalam keseharian.

Ia menambahkan, ini adalah saatnya untuk bersama-sama dan bergotong royong agar pandemi Covid-19 bisa tertangani dengan maksimal.

Hal ini disampaikan saat pertemuan tim kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmi Dyani beserta jajaran di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Jumat

(17/7/2020).

“Kita harus menguatkan hati dan diri kita untuk tetap harus waspada dan ihtiar untuk melakukan penanganan COVID-19 sebaik mungkin untuk meminimalisir dampaknya terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat kita,” kata Ansory.

Ia melanjutkan, saat ini seluruh bangsa sedang dihadapkan pada masa sulit yang mengharuskan untuk bergerak bersama menghadapi pandemi Covid-19. Seluruh dunia dihadapkan pada berbagai perubahan social dan ekonomi yang begitu cepat.

“Meskipun demikian, kita berusaha tidak boleh kalah dengan keadaan,” tegas politisi Fraksi PKS itu.

Ansory menerangkan, berbagai kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi telah dikeluarkan pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

Diantaranya pemberlakuan PSBB yang bervariasi sesuai dengan kondisi suatu daerah, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi untuk penanggulangan Covid-19 termasuk melakukan realokasi anggaran baik APBN dan APBD.

“DPR RI telah menyetujui Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang pada tanggal 12 Mei 2020 dengan harapan berbagai kebijakan ekonomi dapat segera berdampak positif bagi penanggulangan pandemi,” paparnya.



Ansory menilai, dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan penanganan Covid-19 dan realisasi stimulus ekonomi masih menemui banyak kendala. Koordinasi lintas sektor dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah masih belum maksimal sehingga berpengaruh pada efektifitas kebijakan penanganan pandemi. Absennya data yang valid juga mempengaruhi proses penyaluran program social safety net.

“Untuk itu sangatlah penting untuk memastikan bahwa lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas dapat berperan lebih nyata dan optimal sehingga penanggulangan Covid-19 dapat lebih cepat, termasuk bekerjasama dengan

pemerintah daerah,” kilahnya.

Ia menegaskan, selaku wakil rakyat, Komisi IX DPR RI sejak awal juga terus mengawal langkah-langkah percepatan penanganan Covid-19 untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

“Komisi IX DPR RI juga mendorong agar ada percepatan realisasi stimulus yang saat ini sudah dicanangkan pemerintah termasuk stimulus bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun yang di dalamnya termasuk insentif bagi tenaga kesehatan, santunan kematian dan juga pembayaran klaim kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan terhadap pasien Covid-19,” pungkasnya.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# Obat-obatan yang klaim Sembukan Covid-19

## Harus Diatur!



Harus diatur dengan penegakan regulasi guna menentukan produk-produk yang layak dikonsumsi masyarakat. Tidak menyesatkan masyarakat sekadar bisnis saja. Tapi ini soal menyelamatkan masyarakat

**Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI



# Mufida Minta Kemenkes dan BPOM Atur Obat-obatan yang Klaim Sembuhkan Covid-19

Banyak lembaga mengklaim berhasil mengembangkan penangkal Covid-19. Baik berupa suplemen, obat, sampai kalung dan lain-lain. Ini jadinya membuat harapan besar di masyarakat. Jangan sampai saat masyarakat berharap besar ternyata khasiatnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (15/07) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, meminta Kemenkes dan BPOM memastikan suplemen dan obat yang beredar luas di masyarakat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Mufida khawatir banyak suplemen dan obat yang mengklaim mampu menjadi obat Covid-19 padahal hingga kini vaksin Covid-19 belum ditemukan.

Mufida juga sempat menyentil salah satunya adalah kalung anti corona yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.

"Banyak lembaga mengklaim berhasil mengembangkan

penangkal Covid-19. Baik berupa suplemen, obat, sampai kalung dan lain-lain. Ini jadinya membuat harapan besar di masyarakat. Jangan sampai saat masyarakat berharap besar ternyata khasiatnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan," papar Mufida dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Menteri Kesehatan, BPOM, Biofarma dan lembaga lain di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/07/2020).

Politisi PKS ini meminta Kemenkes dan BPOM melakukan validasi dari produk-produk yang sudah beredar luas dan menggunakan strategis pema-

saran yang bombastis dengan mengaitkan dengan Covid-19.

"Harus diatur dengan penegakan regulasi guna menentukkan produk-produk yang layak dikonsumsi masyarakat. Tidak menyesatkan masyarakat sekadar bisnis saja. Tapi ini soal menyelamatkan masyarakat," tutur dia.

Mufida juga meminta agar universitas dan akademisi dilibatkan penuh dalam pengembangan dan penelitian vaksin Covid-19 di dalam negeri. Jangan sampai, ujar dia, semua hasil penelitian dari kampus berakhir menjadi dokumen tanpa manfaat riil bagi masyarakat.

Tak lupa, Mufida meminta Menkes Terawan Agus Putranto untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan mudah dimengerti kepada masyarakat terhadap temuan Covid-19 bisa menular melalui udara.

"Ada banyak pertanyaan dari masyarakat sehingga perlu klarifikasi. Kita berharap tidak menimbulkan keresahan. Lalu kalau benar apa langkah selanjutnya? Secara khusus Komisi IX mendukung penuh program pengembangan vaksin Covid-19 bisa segera ditemukan," kata Mufida.



## Pemerintah Salahkan New Normal

# Netty: Pemerintah Kembali Buat Dagelan

Bukan soal diksinya saja, tapi memang tidak benar jika masyarakat diajak berdamai dengan Covid-19. Adalah sebuah kesalahan pemerintah mengampanyekan new normal, sementara Indonesia belum memenuhi persyaratan WHO tentang adaptasi kebiasaan baru.

### Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (14/07) — Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto merevisi istilah new normal yang dikampanyekan selama pandemi ini karena dianggap diksi yang salah.

Pemerintah mengklaim bahwa masyarakat hanya berfokus pada normal saja. Pernyataan ini mendapat kritikan dari anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Aher, Selasa, (14/07).

"Ini dagelan lagi. New normal disalahkan, padahal Pemerintah juga yang memulai mengenalkan diksi itu pada masyarakat. Kebijakan dan komunikasi pemerintah masih saja berkatut pada istilah dan cover, bukan substansi," ujarnya. Pada kesempatan lain,

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, menyatakan bahwa istilah new normal tidak mudah dimengerti masyarakat karena adanya unsur bahasa asing.

"Bukan soal diksinya saja, tapi memang tidak benar jika masyarakat diajak berdamai dengan Covid-19. Adalah sebuah kesalahan pemerintah mengampanyekan new normal, sementara Indonesia belum memenuhi persyaratan WHO tentang adaptasi kebiasaan baru. Bagaimana bisa hidup lebih sehat, lebih bersih, lebih disiplin, lebih taat dan lebih terlindungi jika angka transmisi masih tinggi, infrastruktur kesehatan kurang mendukung dan masyarakat pun tidak siap," jelas politisi perempuan PKS. Menurut Netty, kini publik

sedang menunggu sikap dan kebijakan yang substansial dari Pemerintah, bukan lontaran wacana yang membuat masyarakat bingung.

"Beragam persoalan menunggu solusi konkret. Penyebaran pandemi belum lagi bisa dikendalikan. Bahkan Jakarta pun memecah rekor tertinggi kasus baru perhari dan rasio tes positif mencapai lebih 10 persen. Belum lagi dampak ikutannya soal PHK, pengangguran, kemiskinan. Apa solusi substansial yang ditawarkan pemerintah?" ujarnya prihatin.

Istri Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018 ini menambahkan bahwa Indonesia memecahkan rekor kasus terbanyak di Asia Tenggara dengan menembus 70.000 kasus; kemampuan melakukan tes dan analisis masih sangat rendah, yaitu 1.074.467 tes yang dilakukan dengan rasio tes 3.927 per 1 juta populasi bahkan masa tunggu analisis hasil tes di beberapa daerah bisa lebih dari satu minggu.

"Bagaimana kita bisa bergerak cepat melakukan antisipasi jika daya dukung kurang. Padahal evolusi Covid-19 menunjukkan cara-cara baru



dalam menginfeksi manusia. Temuan terbaru, soal fenomena air borne, bahwa virus ini bertahan lebih lama di kondisi ruang dengan ventilasi buruk juga harus dipikirkan kebijakan solutifnya," katanya.

embali soal diksi new normal yang dipahami keliru, Netty melanjutkan, jika Pemerintah ingin masyarakat mematuhi arahan pemerintah, maka berhentilah membuat

jargon dan dagelan.

"Sampaikan secara terbuka kepada publik, bagaimana grand design penanganan Covid-19. Pastikan bahwa proses pengetestan, pelacakan dan isolasi serta pelayanan kesehatan atas semua proses tersebut dilakukan dengan baik, transparan dan mudah diakses rakyat," tutup Netty mengakhiri

## Kampus Melakukan PJJ Terancam Sanksi Berat

# Fikri Faqih: Harus ada Pembaruan Regulasi

“Kami mendesak Kemendikbud RI untuk menyelaraskan regulasi tentang pelaksanaan PJJ antara Undang-Undang dengan aturan di bawahnya agar PJJ sebagai bagian dari sisdiknas dan metode pembelajaran di masa pandemi dan setelahnya tidak menjadi kendala

### Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (15/07) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meninjau ulang semua regulasi terkait pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang malah berpotensi mengancam kampus bila dilakukannya.

“Salah satunya adalah Permenristekdikti nomor 51 tahun 2018 yang bisa berdampak pada pencabutan izin kampus bila melanggar ketentuan PJJ,” katanya di DPR, Rabu (15/07).

Dalam kondisi pandemi

Covid-19, hampir seluruh kampus di tanah air melakukan pembelajaran jarak jauh, melaluinya berbagai platform daring.

Ternyata aktifitas ini malah dianggap melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset & Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

Dalam pasal 53 ayat (1) b di Permenristekdikti 51/2018, setiap kampus yang

menyelenggarakan PJJ harus berakreditasi A.

“Padahal selama pandemi, semua jenis kampus mau tidak mau PJJ,” kata Politisi PKS ini.

Sanksi yang diberikan juga tidak main-main. Bila ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka sanksi penutupan sudah mengancam.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Budi Djatmiko.

Budi meminta Pasal 53 Permenristekdikti 51/2018 agar dicabut. Sebab, pasal itu dinilai hanya mengatur perguruan tinggi berakreditasi A yang dapat melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

“Jadi ada gagal paham di kementerian, PJJ dijadikan perizinan baru. Dengan kata lain, sekarang semua perguruan tinggi melanggar peraturan,” kata Ketua Aptisi, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Komisi X DPR, Selasa, (14/07/2020).

Karena itu, Fikri meminta Kemendikbud untuk melakukan



tinjauan ulang atas semua regulasi terkait yang bisa menghambat pelaksanaan PJJ.

“Kami mendesak Kemendikbud RI untuk menyelaraskan regulasi tentang pelaksanaan PJJ antara Undang-Undang dengan aturan di bawahnya agar PJJ sebagai bagian dari sisdiknas dan metode pembelajaran di masa pandemi dan setelahnya tidak menjadi kendala,” pinta Fikri.

Lagi pula, Fikri menambahkan, konsideran aturan Permenristekdikti sudah tidak relevan dengan subjek yang mengatur.

“Sebelumnya Lembaga yang mengatur adalah Kementerian Riset-Dikti, sekarang

kampus sudah bergabung di bawah Kemendikbud kembali dalam dirjen Pendidikan Tinggi, aturan yang seharusnya adalah Permendikbud,” urainya.

Dikesempatan yang sama, Politisi asal daerah pemilihan Tegal-Brebes, Jawa Tengah ini juga menyampaikan pentingnya penggunaan platform daring buatan anak negeri dalam mendukung pelaksanaan PJJ.

“Kemendikbud RI perlu mendukung dan menyosialisasikan tentang penggunaan aplikasi lokal dan mempersiapkan dengan baik agar PJJ tidak tergantung pada produk asing,” saran Fikri mengakhiri.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**OPINI**  
Kamis 16 Juli 2020

# Omnibus Law (Cilaka) Pendidikan Nasional

**OLEH :**  
**Dr. FAHMY ALAYDROES, M.M.,M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI





# Omnibus Law (Cilaka) Pendidikan Nasional

Jakarta (15/07) — Badan Legislatif DPR sedang gencar membahas RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law), RUU yang sempat diberi nama ‘RUU Cilaka’ (Cipta Lapangan Kerja), yang kemudian diganti menjadi RUU Cipta Kerja. RUU ini, yang juga populer dikenal dengan sebutan “Omnibus Law”, atau perampangan aturan, bermuatan lebih dari 1000 pasal yang dikelompokkan menjadi 11 kluster.

RUU ini secara keseluruhan berpotensi mengubah lebih dari 1.000 pasal dalam 79 Undang-Undang yang berlaku, termasuk UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

RUU Cipta Kerja adalah

inisiatif Pemerintah, telah diserahkan kepada DPR untuk dibahas, dan DPR telah menetapkannya sebagai RUU prioritas untuk segera disahkan menjadi UU. RUU ini dimaksudkan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia serta mendorong pertumbuhan perekonomian.

Hanya saja, pasal-pasal yang tercantum di dalamnya telah mengundang perdebatan publik, mengundang protes para kelompok buruh yang merasa (akan) dirugikan, dan juga dikritisi oleh para pengamat dan pakar pendidikan yang menganggap bahwa RUU ini berpotensi mengancam eksistensi, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional.

RUU Cipta Kerja adalah inisiatif Pemerintah, telah diserahkan kepada DPR untuk dibahas, dan DPR telah menetapkannya sebagai RUU prioritas untuk segera disahkan menjadi UU. RUU ini dimaksudkan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia serta mendorong pertumbuhan perekonomian.

Jika kita cermati rancangan Omnibus Law akan menemui banyak catatan dan kemunduran terhadap pendidikan di Indonesia.

Omnibus Law bidang pendidikan dan kebudayaan setidaknya merupakan amandemen dari 3 produk hukum undang-undang yang terkait dengan pendidikan, yaitu: Undang-undang no. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-undang no.12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi. Beberapa hal yang harus dikritisi, antara lain:

**Dominasi Pemerintah Pusat**  
Semangat Omnibus Law ini adalah menjadikan Pemerintah Pusat (Presiden) sebagai Pengusaha yang menentukan segala hal terkait penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 62 RUU Omnibus law menyebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan non formal wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan



Foto : istimewa

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

Pasal ini mengubah pasal yang sebelumnya ada di UU Sisdiknas (UU Nomor 20/2003), yang mana kewenangan memberi izin dan mencabut diberikan ke Pemerintah daerah. Sekaligus, pasal ini berpotensi mempersulit peran serta masyarakat yang hendak mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan, karena harus izin ke Presiden (!), apalagi mereka yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dan terpencil.

Kebijakan yang aneh dan menimbulkan pertanyaan kritis, apa maksud di balik semua ini? Padahal, selama ini sepanjang sejarah, sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan telah hadir memberi kontribusi nyata ikut

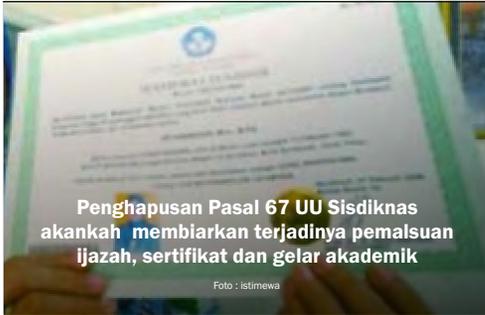
mencerdaskan bangsa, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka!

**Komersialisasi Pendidikan**  
RUU Omnibus Law ini bertujuan untuk menggerakkan sektor ekonomi, dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

Tidak terkecuali, sektor pendidikan juga diberi kesempatan untuk menjadi kegiatan komersil. Pasal 53 Omnibus law, mengubah semangat pendidikan yang sebelumnya adalah nir laba (baca: semata-mata demi kebaikan sosial), menjadi terbuka untuk dikelola secara komersil. RUU ini mengharuskan lembaga pendidikan (baik formal ataupun nono formal) yang didirikan masyarakat berbadan hukum pendidikan (BHP).

Tentu saja, dibukanya peluang ini akan menjadikan lembaga pendidikan mengede-

# Omnibus Law (Cilaka) .... hal 2



**Penghapusan Pasal 67 UU Sisdiknas akankah membiarkan terjadinya pemalsuan ijazah, sertifikat dan gelar akademik**

Foto : listimewa

pankan tujuan kepentingan ekonomi, alih-alih mencapai tujuan pendidikan nasional yang memerlukan semangat gotong royong.

Semangat komersialisasi pendidikan ini juga dibarengi dengan pelanggaran syarat bagi lembaga pendidikan asing yang hendak mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

Di pasal 65, lembaga pendidikan asing yang hendak membuka cabang di Indonesia tidak perlu lagi mesti terakreditasi dan diakui di Negara asalnya, dan juga tidak mesti bekerjasama dengan mitra di dalam negeri (sebagaimana ditetapkan di UU Sisdiknas). Di buka bebas, yang penting mampu

membuka lapangan pekerjaan.

Di satu sisi lembaga pendidikan dalam negeri harus izin pemerintah pusat, di sisi lain lembaga pendidikan asing membuka pertanyaan kritis, mak-sudnya apa..?

Tidak Memerlukan Sertifikasi Kompetensi UU Omnibus Law menghapus ketentuan wajibnya sertifikat kompetensi untuk guru dan dosen. Artinya, siapa saja dapat menjadi guru atau dosen. Termasuk guru atau dosen dari Negara asing juga diperbolehkan, tidak harus memiliki sertifikat kompetensi mengajar, yang penting lulusan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi di negaranya.

RUU Omnibus Law ini juga

Dengan dihapuskannya pasal 67 ini, seolah pemerintah membiarkan terjadinya pemalsuan ijazah, sertifikat dan gelar akademik. Meskipun tindakan pidana pembuatan surat palsu sudah ada di KUHP (Pasal 263), namun isinya sangat umum dan tidak langsung terkait dengan tindakan pidana sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 67 UU Sisdiknas.

menghapus pasal sanksi pidana atau denda maksimal Rp. 1 milyar bagi pihak-pihak yang memalsukan sertifikat kompetensi, atau ijazah atau gelar akademik sebagaimana diatur pada Pasal 67 UU Sisdiknas (UU No. 20/2003).

Dengan dihapuskannya pasal 67 ini, seolah pemerintah membiarkan terjadinya pemalsuan ijazah, sertifikat dan gelar akademik. Meskipun tindakan pidana pembuatan surat palsu sudah ada di KUHP (Pasal 263), namun isinya sangat umum dan tidak langsung terkait dengan tindakan pidana sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 67 UU Sisdiknas.

Penghapusan ini sama sekali tidak berguna, bahkan men-

imbulkan kesan, demi untuk menciptakan lapangan kerja, boleh berbuat sesuka hati. (?)

RUU ini berpotensi menjadikan Pendidikan Nasional tercerabut dari akar filosofisnya, karena RUU ini memposisikan proses dan kelembagaan pendidikan sebagai instrument penggerak ekonomi belaka. Padahal, Pendidikan adalah proses menumbuhkan budaya yang luhur dalam kehidupan.

Proses pendidikan, menurut John Dewey (1950) adalah sebuah proses reorganisasi, rekonstruksi, transformasi pengalaman yang tiada henti. John Dewey memandang pendidikan bukan sebuah persiapan untuk hidup, melainkan bagian dari hidup itu sendiri.

KH Dewantara meyakini bahwa Pendidikan bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi peserta didik. Tujuan pendidikan yang luhur tersebut didukung oleh fungsi pendidikan, yang menurut Noeng Muhadjir (2000) meliputi tiga fungsi, yaitu :

(1) Menumbuhkan kreativitas subjek-didik, (2) Memperkaya khasanah budaya manusia, memperkaya nilai-nilai insani, dan nilai-nilai ilahi, dan (3) menyiapkan tenaga kerja produktif.

Dalam konteks pendidikan nasional, fungsi pendidikan adalah "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ....(Undang-Undang No. 20 tahun 2003, pasal 3).

Pemerintah dan DPR seharusnya bersikap arif dan bijaksana, jangan terlalu "bernafsu" dan mengubah seenaknya saja Undang-Undang yang terkait dengan Pendidikan Nasional.

Mari kita ubah dan perbaiki, diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tapi jangan cabut Pendidikan Nasional dari akar filosofisnya dan tujuannya yang luhur: mencerdaskan kehidupan bangsa.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# Perlu Tindakan Cepat Untuk Antisipasi Lonjakan Kemiskinan

“Pemerintah harus lebih serius memperhatikan persoalan kemiskinan ini. Lonjakan kemiskinan bukan sekedar angka statistik, tetapi ini adalah terkait dengan soal beban berat hidup dan keadilan bagi rakyat yang menjadi bagian bangsa kita. Kalau pemerintah tidak cepat, angka kemiskinan akan bertambah banyak ketika ekonomi masuk ke jurang resesi

**H. Ecky Awal Mucharam**  
Anggota Komisi XI DPR RI



# Ecky: Perlu Tindakan Cepat Untuk Antisipasi Lonjakan Kemiskinan

“Pemerintah harus lebih serius memperhatikan persoalan kemiskinan ini. Lonjakan kemiskinan bukan sekedar angka statistik, tetapi ini adalah terkait dengan soal beban berat hidup dan keadilan bagi rakyat yang menjadi bagian bangsa kita. Kalau pemerintah tidak cepat, angka kemiskinan akan bertambah banyak ketika ekonomi masuk ke jurang resesi

## H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah untuk melakukan antisipasi cepat atas potensi lonjakan jumlah rakyat miskin.

“Kita sudah memahami bahwa Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi baik di sisi supply maupun demand secara signifikan. Hal ini berdampak meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja,

jumlah pengangguran, serta berpotensi meningkatkan jumlah rakyat miskin. Sehingga perlu tindakan cepat pemerintah untuk antisipasi dini. Eksekusi berbagai kebijakan dan program harus berjalan cepat”, tegasnya menanggapi rilis meningkatnya angka kemiskinan BPS yang baru saja dilansir.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan naik

karena Pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat.

BPS mengumumkan persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang. Jumlah itu naik 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019.

“Pemerintah harus lebih serius memperhatikan persoalan kemiskinan ini. Lonjakan kemiskinan bukan sekedar angka statistik, tetapi ini adalah terkait dengan soal beban berat hidup dan keadilan bagi rakyat yang menjadi bagian bangsa kita. Kalau pemerintah tidak cepat, angka kemiskinan akan bertambah banyak ketika ekonomi masuk ke jurang resesi,” tandas Ecky.

Terlebih, lanjutnya, ini masih angka dibulan Maret dan angka kemiskinan yang dirilis BPS belum mencerminkan dampak pandemi sepenuhnya.

“Kondisi yang berpotensi



semakin berat setelah paparan Covid-19 meluas terjadi setelah Maret 2020. Pemerintah harus bekerja sungguh-sungguh dan ekstra”, tegasnya.

Ecky menekankan bahwa berbagai kebijakan dan anggaran untuk rakyat miskin dan rakyat terdampak harus benar-benar bisa dieksekusi cepat dan tepat. Alokasi program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial harus tepat waktu dan tepat sasaran.

“Tidak boleh ada rakyat yang kelaparan karena tertundanya bantuan. Kita juga telah mendorong agar subsidi listrik dan LPG untuk rakyat miskin tetap diberikan. Prioritas anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus untuk rakyat miskin & menggerakkan kembali perekonomian rakyat”, imbuhnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS

DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyoroti data BPS yang menyatakan lonjakan angka kemiskinan juga diakibatkan kenaikan signifikan harga-harga kebutuhan pokok.

Ecky menekankan perlunya pemerintah pusat & pemerintah daerah memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan kebutuhan pokok agar tidak membebani daya beli rakyat.

Pasokan kebutuhan pokok harus dipastikan aman pada semua wilayah. Kelancaran distribusinya harus dijamin pemerintah dan aparat keamanan. Distribusi dan pasokan kebutuhan pokok sangat penting untuk stabilitas harga. Lonjakan harga kebutuhan pokok akan semakin memukul rakyat miskin dan rakyat terdampak. Ini harus dikendalikan cepat”, pungkasnya.

## Dorong Daya Beli Masyarakat

# Aleg PKS Desak Pemerintah Segera Cairkan Gaji ke-13

Konsumsi rumah tangga paling besar kontribusinya atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang 50-60 persen atas PDB. Apa saja yang bisa mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga, Pemerintah harus gerakkan. Apalagi sifatnya transfer langsung kepada rakyat.

## H. HIDAYATULLAH, S.E

Anggota Komisi XI DPR RI

Medan (20/07) --- Sikap pemerintah yang menunda-nunda pencairan gaji 13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipertanyakan oleh Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Hidayatullah.

"Padahal gaji ke-13 meski hanya untuk PNS, mampu mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga," kata Hidayatullah di Medan (20/07).

Menurut legislator PKS ini konsumsi rumah tangga paling besar kontribusinya atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia, konsumsi rumah

tangga menyumbang 50-60 persen atas PDB.

"Apa saja yang bisa mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga, Pemerintah harus gerakkan. Apalagi sifatnya transfer langsung kepada rakyat," ujarnya.

Efek pandemi Covid-19 berdampak pada turunnya konsumsi rumah tangga di kuartal-I 2020 menjadi 2,84 persen dan kuartal-II akan melemah secara signifikan.

"Jika mau mengantisipasi agar Indonesia terhindar resesi

ekonomi maka harus segera dipulihkan konsumsi rumah tangganya," ujar Hidayatullah.

Menurut Hidayatullah terkait teknis pencairan gaji ke-13 PNS ini bisa saja dibatasi untuk eselon III ke bawah saja yang jumlahnya mencapai 400 ribu jiwa.

"Untuk eselon I dan II diperkirakan masih mampu bertahan karena pendapatannya cukup memadai," ujarnya.

Selama ini pemerintah telah mengalirkan dana bantuan kepada sejumlah BUMN pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp152,15 triliun dan Himpunan Bank Milik Negara sebanyak Rp 30 triliun.

"Pemerintah jangan hanya mendorong dari sisi insentif bagi perusahaan dan pengusaha saja, tapi harus dorong daya belinya dari sektor masyarakat juga agar berimbang," pungkas Hidayatullah.



*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



# RAPAT PARIPURNA DPR KE 19

Rapat Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019 - 2020



INTERUPSI RAPAT PARIPURNA

## Sudah saatnya RUU HIP dicabut dari Prolegnas

Menyikapi dan melihat perkembangan masyarakat yang ada di DPR saat ini, kami juga menerima utusan mereka, mereka menuntut agar RUU HIP ditolak dan dicabut. Itu juga sesuai dengan pandangan MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya. Semua sepakat itu ditolak dan tidak dilanjutkan serta dicabut dari Prolegnas. RUU dapat dicabut dalam Rapat Paripurna. Saya menyarankan dalam Rapat Paripurna ini RUU HIP dicabut. Agar kita bisa tetap fokus pada penanganan Covid-19

**KH. Bukhori, Lc., M.A.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

# RAPAT PARIPURNA DPR KE 19

Rapat Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019 - 2020



INTERUPSI RAPAT PARIPURNA

## Pemerintah melanggar hukum terkait iuran BPJS, DPR mestinya Bersikap

Ada PP 82/2018 tentang Jamsos dan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS. Setelah dinaikkan, kita ribut di DPR dan Pemerintah, kemudian ada MA yang membatalkan Perpres 75/2019. Begitu dibatalkan rakyat senang, namun muncul Perpres 64/2020 yang menandakan bahwa Pemerintah tidak empati terhadap masyarakat kecil di tengah kesusahan penderitaan. Lalu menunjukkan Pemerintah tidak taat hukum. Dengan dua alasan itu, saya mengusulkan harus ada reaksi dan tindakan soal ini. Kemudian bantuan PMN diberikan 130 Triliun namun untuk fakir miskin hanya 2,3 Triliun. Tapi tidak ada komentar dari Pimpinan DPR soal ini.

**H. Ansory Siregar, Lc**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI



## Terkait Perpres Perubahan Kartu Prakerja

# Legislator PKS: Mestinya Hentikan Saja

Saya melihat tidak banyak perubahan dalam Perpres ini, semangatnya masih sama seperti yang lama. Termasuk soal pelatihan daring yang banyak mendapat kritikan, masih saja akan dilakukan.

### H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Yogyakarta (14/07) — Presiden Joko Widodo melakukan revisi pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja pada 7 Juli 2020 lalu.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyatakan keheranan atas sikap Pemerintah yang masih bersikukuh melanjutkan program kartu prakerja yang banyak mendapat kritikan masyarakat. Demikian pesan tertulis disampaikan Sukamta kepada media (12/07/2020).

"Saya melihat tidak banyak perubahan dalam Perpres ini, semangatnya masih sama seperti yang lama. Termasuk soal pelatihan daring yang banyak mendapat kritikan,

masih saja akan dilakukan. Dalam Perpres yang baru pada pasal 5 ditambahkan adanya konten pelatihan kewirausahaan, juga disebutkan di pasal 6 ayat 2 pelatihan dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja, ini kan seperti tambahan pemanis saja," ungkapnya.

Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI ini, jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan online ditiadakan dan skema kartu prakerja murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK.

Hal ini menurut Sukamta, akan lebih menghemat pengeluaran uang pemerintah yang saat ini jumlahnya terbatas karena minimnya pendapatan negara.

"Mestinya dengan kondisi krisis ekonomi yang mulai terasa saat ini, semangatnya

efisiensi anggaran hanya untuk hal-hal yang mendesak. Jika pelatihan secara online ditiadakan, setidaknya negara bisa hemat 5,6 triliun.

Anggaran ini bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau untuk pemulihan usaha mikro dan kecil," terangnya.

Lebih lanjut Sukamta juga melihat aktivitas transaksi melalui platform digital pada masa pandemi saat ini meningkat pesat. Laporan Kominfo, aktivitas belanja online meningkat sampai 400 persen selama pandemi Covid-19. Bank Indonesia juga mencatat transaksi e-commerce melonjak jadi USD2,4 miliar atau meningkat 26 persen dari kuartal II-2019.

"Dengan kondisi masyarakat yang alami kesulitan ekonomi, pemerintah bisa meminta kepada perusahaan platform digital untuk berikan pelatihan secara gratis kepada masyarakat, khususnya kalangan pencari kerja dari keluarga tidak mampu. Saya yakin perusahaan platform digital yang saat ini sedang mereguk untung besar mau untuk buat skema pelatihan gratis," papar Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga tetap ingatkan pemerintah untuk



tidak semuanya membuat aturan dimasa pandemi yang dapat dapat mengarah kepada moral hazard. Seperti di Perpres revisi ini disebutkan pada pasal 31A, pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah.

"Ini kan jelas bisa membuka peluang korupsi, karena diberi diskresi sebagai proses yang tidak masuk pengadaan barang dan jasa.

Apalagi pada pasal 31B disebutkan, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada itikad baik. Ukuran itikad baik kan sangat subjektif, revisi Perpres ini terlalu berlebihan. Akan lebih baik program ini dihentikan saja dan diganti dengan skema bantuan untuk korban PHK akibat pandemi," tutup Sukamta.



**Jazuli Juwaini**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Saudaraku, sampai saat ini PKS belum bicara tentang Calon Presiden untuk Pemilu 2024. PKS masih fokus untuk persiapan Pemilu Raya (Pemira) memilih anggota Majelis Syuro.



1/2

Luncurkan Program Kemitraan,

# Anis Komitmen Berdayakan UMKM Jakarta Timur

Manfaatkan jaringan yang dimiliki dan kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

**Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jakarta Timur

Luncurkan Program Kemitraan

# Anis Komitmen Berdayakan UMKM Jakarta Timur

Manfaatkan jaringan yang dimiliki dan kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (13/07) — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, dalam sambutannya di tengah-tengah Rapat Virtual bersama UMKM se-Jakarta Timur pada hari Ahad Juli 2020, menyampaikan bahwa UMKM merupakan penopang utama ekonomi nasional.

Dalam rapat yang dihadiri 47 anggota UMKM di Jakarta Timur ini, Anis menyatakan bahwa pada masa pandemi ini mayoritas pengusaha di Indonesia yaitu sebesar 97,9% adalah UMKM.

Anis mengutip data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan

pelaku usaha di Indonesia (2017). Sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit.

"Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%). Sedangkan Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, dan Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% tenaga kerja nasional," papar Anis.

Anis yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini menyampaikan harapannya agar UMKM di Jakarta Timur bisa bangkit dan meningkat

aktivitasnya.

"Manfaatkan jaringan yang dimiliki dan kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," pesan Anis.

Pertemuan para pelaku UMKM ini sendiri dilaksanakan dalam rangka membentuk jaringan UMKM Jakarta Timur serta brain storming program kemitraan UMKM dengan lembaga-lembaga yang memungkinkan untuk bekerjasama melakukan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Mengakhiri sambutannya, Anis menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk membersamai para pelaku UMKM dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha mereka. Anis mengajak para pelaku UMKM untuk bekerja secara amanah dan profesional.

"Karena pada hakekatnya seluruh pekerjaan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT," tutup Anis.



# Slamet Temui Mahasiswa yang Kepung Kantor DPRD saat Unjukrasa Tolak RUU Ciptaker

Memberi apresiasi bahwa mahasiswa fungsinya memang menyuarakan masyarakat. Bentuk apresiasi saya adalah dengan hadir pada hari ini. Bagi teman-teman DPR RI lain yang tidak hadir saya tidak tahu. Ingin saya sampaikan, secara pribadi dan fraksi bahwa RUU ini memang harus ditolak

## drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (16/07) — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sukabumi Bergerak, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Sukabumi, Kamis (16/7/2020). Aksi tersebut digelar untuk menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Massa aksi telah berkumpul di Lapangan Merdeka Sukabumi sejak pukul 08.00 WIB. Kemudian massa aksi melakukan longmarch menuju kantor DPRD Kota Sukabumi dengan membawa spanduk dan atribut penolakan RUU Cipta Kerja.

"Karena dalam penyusunan RUU Omnibus Law ini, kecil keterlibatan masyarakat. Kita meminta agar RUU Cipta Kerja ini untuk dibahas lebih detail dan melibatkan masyarakat," kata Juru Bicara Aliansi Sukabumi Bergerak Anggi Fauzi kepada media usai pelaksanaan aksi.

Anggi menuturkan, pihaknya menolak seluruh poin dalam RUU Cipta Kerja tersebut sebab dianggap merugikan masyarakat.

"Semua RUU ini kita tolak. Minimal menjadi bahan pertimbangan bahwa di lapisan

bawah masyarakat banyak yang menolak. Kita berharap tadi bisa masuk ke dalam (kantor DPRD Kota Sukabumi) untuk menyampaikan poin tuntutan kita. Kami juga ingin bertemu dengan DPR RI Dapil Sukabumi yakni enam orang, tapi hanya ada satu. Itu adalah bentuk kekecewaan kita," jelas Anggi.

Aksi tersebut diterima langsung oleh sejumlah Anggota DPRD Kota Sukabumi dan Anggota DPR RI Dapil Sukabumi, drh Slamet.

"Memberi apresiasi bahwa mahasiswa fungsinya memang menyuarakan masyarakat. Bentuk apresiasi saya adalah dengan hadir pada hari ini. Bagi teman-teman DPR RI lain yang tidak hadir saya tidak tahu. Ingin saya sampaikan, secara pribadi dan fraksi bahwa RUU ini memang harus ditolak," ucap Slamet menanggapi aksi tersebut.

Slamet mengungkapkan, perkembangan RUU Cipta Kerja sendiri saat ini tengah dalam proses pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.



"Saya membaca sendiri dan termasuk membahas di fraksi PKS yang berisiran dengan komisi saya. Banyak hal yang memang harus ditolak. Saya sepakat dengan mahasiswa. Jadi di RUU Cipta Kerja itu perizinan dipermudah, termasuk AMDAL dihilangkan.

Seluruh perizinan ditarik ke pusat, peran Pemda ditiadakan. Seluruh sanksi yang menyangkut kepada pengusaha ditiadakan. Padahal di UU existingtonya ada," papar Slamet.

# Legislator Sumbar Apresiasi Pemprov Jadi Rujukan Nasional Penanganan Covid-19

Keberhasilan Sumatera Barat dalam penanganan Covid-19, sudah mendapatkan pengakuan dari presiden RI, bapak Joko Widodo dimana dalam berbagai kesempatan termasuk pada forum pertemuan Gubernur Seluruh Indonesia

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (20/07) — Anggota DPR RI asal Sumatra Barat yang duduk di Komisi VI, Nevi Zuairina mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi rujukan Nasional dalam penanganan Covid-19.

Prestasi Sumatera Barat unggul dalam mengendalikan wabah virus corona salah satu sebab utamanya adalah kebersamaan semua stakeholder yang ada mulai dari Kepala Daerah Provinsi dan 19 Kepala Daerah kabupaten kota, forkopimda Sumbar, akademisi, tokoh adat serta kaum ulama untuk bersinergi mengatasi wabah ini.

"Keberhasilan Sumatera Barat dalam penanganan Covid-19, sudah mendapatkan pengakuan dari presiden RI, bapak Joko Widodo dimana dalam

berbagai kesempatan termasuk pada forum pertemuan Gubernur Seluruh Indonesia," tutur Nevi.

Sumatera Barat, lanjut Nevi, sebagai salah satu dari lima provinsi terbaik dalam menangani Covid-19 dan serapan anggaran penanganan wabah ini sudah sesuai dengan harapan yang terbukti daerah ini menjadi tempat yang aman sehingga membuka diri untuk dikunjungi.

"Peran para tokoh Sumatera Barat yang selalu bersinergi dengan pemerintah daerah merupakan kunci utama keberhasilan propinsi ini dalam menghadapi wabah. Salah satunya adalah sinergi dokter Andani Eka Putra dan Pemprov yang menggunakan pool test,

bukan rapid test dimana test dilakukan dengan PCR – Swab Test yang dilakukan dengan cepat dengan kapasitas sangat besar yakni 3.500 sehari", ujar Nevi.

Legislator daerah pemilihan Sumatera Barat II ini menginformasikan bahwa Gubernur bersama jajaran telah membuka diri untuk daerah Sumatera Barat sebagai tujuan Wisata.

"Wisawatan Asing maupun Wisatawan Nusantara yang hadir ke Sumatera Barat ini dipersilahkan masuk Sumbar dengan protokol standar kesehatan dimana kunjungan para wisatawan diharapkan kegiatan ekonomi dapat bangkit kembali di Sumbar", papar Nevi.

Potensi Wisata Sumbar, kata Nevi, merupakan andalan provinsi ini untuk menggerakkan ekonomi seluruh masyarakatnya.

"Saya apresiasi pada prestasi Sumbar ini dalam penanganan covid-19, dan bagi seluruh warga Sumbar yang pada momentum Idul Fitri kemaren tidak dapat pulang kampung, yang sedang di rantau dipersilahkan pulang di hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Qurban", ucap Nevi Zuairina.



## Masa Reses

# Junaidi Auly Kembali Distribusikan Bahan Pokok ke Masyarakat

Alhamdulillah diberikan kesempatan kembali untuk mendistribusikan paket bahan pokok kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19 di Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, semoga bantuan ini bermanfaat

**Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung II

Lampung (20/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly kembali mendistribusikan paket bahan pokok kepada masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.

"Alhamdulillah diberikan kesempatan kembali untuk mendistribusikan paket bahan pokok kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19 di Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, semoga bantuan ini bermanfaat," ujar Junaidi di Tulang Bawang Barat, Senin (20/7/2020)

Anggota DPR dari Dapil Lampung II ini menuturkan bahwa penting berbagai pihak untuk ikut berkontribusi meringankan beban ekonomi masyarakat.

"Persoalan membantu tentu bukan saja tugas pemerintah, melainkan kami sebagai legislator terus berusaha turun ke lapangan langsung dan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat" jelas Junaidi

Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan bahwa pemberian bantuan

sosial berupa bahan pokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya pada situasi pandemi kali ini yang menghambat aktivitas ekonomi. Tindakan nyata pemerintah penting untuk hadir dalam membantu masyarakat melalui program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap pemerintah bukan saja memperhatikan bantuan sosial pada sisi kualitas dan kuantitas, melainkan reponsivitas dan kecermatan dalam memberikan bantuan" Tutup Junaidi



# HARI ASPIRASI



## Aspirasi dari forum komunikasi Guru SPK Indonesia

Jakarta (28/06) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menerima aspirasi secara langsung dari Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI pada Selasa 7 Juli 2020.

Pertemuan ini mengagendakan aspirasi tentang Kebijakan Kemendikbud tentang pencabutan tunjangan profesi bagi guru Satuan pendidikan kerjasama (SPK).



# HARI ASPIRASI



## Aspirasi dari Forum Solidaritas Pekerja Trimas

Jakarta (14/07) --- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima kedatangan dan aspirasi dari Forum Solidaritas Pekerja Trimas (Karyawan PT Tri Sakti Lautan Mas). di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI,

Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/07).

Aspirasi iditerima langsung Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sositomto dan Suryadi Jaya Permana. Pertemuan mengagen-

dakan Aduan terkait keputusan Dirjen Perhubungan Laut pada 9 Juni tentang penahanan kapal yang berdampak pada nasib 320 karyawan yang tidak jelas kesejahteraannya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Berharap Dukungan Pemerintah

# Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia Sampaikan Aspirasi ke Fraksi PKS

Jadi PR yang harus kami lakukan adalah berkoordinasi dengan Komisi XI terkait dengan pajak terhadap peralatan Olahraga, berdiskusi dengan Kemenpora agar lebih memperhatikan Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia, memperjelas induk olahraga di atasnya dan melakukan sosialisasi terhadap Perkumpulan Olahraga ini

**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI



# Fraksi PKS Terima Aspirasi Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia

Jadi PR yang harus kami lakukan adalah berkoordinasi dengan Komisi XI terkait dengan pajak terhadap peralatan Olahraga, berdiskusi dengan Kemenpora agar lebih memperhatikan Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia, memperjelas induk olahraga di atasnya dan melakukan sosialisasi terhadap Perkumpulan Olahraga ini

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (14/07) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima kedatangan dan aspirasi Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/07).

Sekretaris Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, dalam sambutannya menyampaikan akan meneruskan apa yang menjadi aspirasi dan juga masukan dari rekan-rekan Perkumpulan Sepakbola

Amputasi Indonesia.

"Kami di Fraksi PKS DPR RI memang secara khusus membuka ruang aspirasi bagi masyarakat setiap hari Selasa dan Jumat. insyaAllah hasil dari aspirasi dari rekan-rekan akan dicatat untuk diteruskan kepada para Anggota sesuai dengan bidang atau poksinya masing-masing", ungkap Anggota Komisi X DPR RI ini.

Ketua Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia, Yudi Yahya mengatakan, pihaknya

hingga saat ini tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Olahraga (Kemenpora).

"Sampai saat ini kami sudah memiliki proses pembinaan bahkan sudah mengikuti beberapa turnamen seperti di Malaysia. Akan tetapi hingga saat ini, kami belum mendapatkan support atau dukungan dari Kemenpora dan pihak-pihak Swasta. Justru yang mendukung kami adalah Dispora DKI Jakarta", papar Yudi.

Dalam kesempatan ini, Yudi pun meminta Fraksi PKS agar mendorong Kemenpora, agar lebih memperhatikan Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia untuk mengikuti Pra Piala Asia di Malaysia.

"Sampai saat ini kami sudah berupaya untuk mengirimkan surat kepada Kementerian Olahraga, namun belum juga ada respon. Kami berharap kepada Fraksi PKS untuk bisa menyampaikan dukungan Pemerintah dalam hal ini Kemenpora, seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Malaysia,"



publikasny.

Sementara itu, Ledia menambahkan, pihaknya masih berupaya dalam mengubah sudut pandang terkait dengan Olahraga bagi para penyandang disabilitas.

"Memang yang paling sulit adalah bagaimana mengubah paradigma semua pihak, terkait dengan Olahraga yang umum di masyarakat dan Olahraga bagi penyandang disabilitas," ujar Anggota DPR asal Bandung ini.

Lebih lanjut Ledia menyampaikan, akan berdiskusi dengan Kemenpora dan juga

melihat penyampaian anggaran, agar bisa mengusulkan untuk masuk dalam anggaran masa mendatang.

"Jadi PR yang harus kami lakukan adalah berkoordinasi dengan Komisi XI terkait dengan pajak terhadap peralatan Olahraga, berdiskusi dengan Kemenpora agar lebih memperhatikan Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia, memperjelas induk olahraga di atasnya dan melakukan sosialisasi terhadap Perkumpulan Olahraga ini," terang Ledia.

## Ingin Keseimbangan Prestasi dan Kesejahteraan Atlet

# Fraksi PKS Dengarkan Aspirasi Praktisi Olahraga

Kami juga berharap, agar para Atlet diberikan kesetaraan antara atlet secara umum dengan atlet penyandang disabilitas. Kami tidak ingin ada diskriminasi bagi atlet yang memiliki keterbatasan, sehingga sebagian harus menanggalkan profesi atletnya.

### Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (16/07) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Webinar yang mengangkat tema ‘Prestasi & Kesejahteraan Atlet Dalam Desain Sistem Keolahragaan Nasional’ yang berlangsung secara daring pada Kamis, (16/07).

Webinar secara online ini dibuka oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainudin Amali. Dalam kesempatan ini juga dihadiri beberapa narasumber seperti Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal, Sekretaris

Kemenpora Gatot Dewa Broto, Ponaryo Astaman sebagai General Manager Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), dan Atlet Berprestasi Penyandang Disabilitas Banyu Trimulyo.

Dalam pembukaannya, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan tema Olahraga sengaja dipilih sebagai tanggung jawab moral dan kepedulian Fraksi PKS DPR RI dalam dunia Olahraga dan dunia ke-Atletan sebagai aktivitas penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dalam rangka juga kami untuk menyerap terkait dengan

revisi Undang-Undang sistem Keolahragaan Nasional. Kita ingin UU ini diperkaya dengan berbagai masukan dari berbagai elemen masyarakat naik itu akademisi dan juga para praktisi olahraga, sekaligus juga masukan dari Kementerian yang akan melengkapi UU ini”, ungkap Jazuli.

Jazuli menambahkan Fraksi PKS sangat menginginkan keseimbangan antara Prestasi dan Kesejahteraan Atlet. Jangan hanya Atlet hanya dituntut untuk terus berprestasi tetapi kesejahteraannya tidak diperhatikan.

“Kita ingin ada balancing antara kesejahteraan Atlet dengan prestasi-prestasi yang dipersembahkan. Dan kami punya keyakinan, ketika kesejahteraan itu diperhatikan maka Atlet akan terfokus meningkatkan prestasinya yang tentu akan membawa nama harum bangsa bukan hanya dalam lingkup Nasional tetapi juga dalam level Internasional secara global”, pungkask Anggota Komisi I DPR RI ini.

Lebih lanjut, Jazuli



mengatakan pihaknya berharap sistem olahraga Nasional jauh lebih baik dan berkualitas jika di back-up dengan regulasi yang memadai dengan pemikiran besar Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Kami juga berharap, agar para Atlet diberikan kesetaraan antara atlet secara umum dengan atlet penyandang disabilitas. Kami tidak ingin ada diskriminasi bagi atlet yang memiliki keterbatasan, sehingga sebagian harus menanggalkan profesinya sebagai atlet”, ungkapnya.

Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali mengapresiasi Fraksi PKS yang telah mengangkat tema Olahraga yang tentunya bisa

mendorong semangat masyarakat dalam berolahraga baik olahraga masyarakat, olahraga pendidikan ataupun olahraga prestasi.

“Terimakasih kepada Fraksi PKS yang punya kepedulian terhadap masalah-masalah olahraga. Perhatian kita terhadap dunia olahraga memang perlu ditingkatkan sekali, jika kita ingin meraih prestasi di kemudian hari,” ungkapnya.

Zainudin menambahkan pendidikan karakter dan semangat itu sangat penting dimiliki oleh para atlet Indonesia, sehingga daya juang atlet Indonesia bisa jauh lebih baik di masa yang akan datang.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Inginkan Keseimbangan Prestasi  
dan Kesejahteraan Atlet

# Fraksi PKS DPR Dengarkan Aspirasi Praktisi Olahraga

Webinar

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**PRESTASI &  
KESEJAHTERAAN ATLET**  
*Dalam Desain Sistem Keolahragaan Nasional*

Kita ingin ada balancing antara kesejahteraan Atlet dengan prestasi-prestasi yang dipersembahkan. Dan kami punya keyakinan, ketika kesejahteraan itu diperhatikan maka Atlet akan terfokus meningkatkan prestasinya yang tentu akan membawa nama harum bangsa bukan hanya dalam lingkup Nasional tetapi juga dalam level Internasional secara global",

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Webinar

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## **PRESTASI & KESEJAHTERAAN ATLET** *Dalam Dewan Sistem Keolahragaan Nasional*

Terimakasih kepada Fraksi PKS yang punya kepedulian terhadap masalah-masalah olahraga. Perhatian kita terhadap dunia olahraga memang perlu ditingkatkan sekali, jika kita ingin meraih prestasi di kemudian hari. pendidikan karakter dan semangat itu sangat penting dimiliki oleh para atlet Indonesia, sehingga daya juang atlet Indonesia bisa jauh lebih baik di masa yang akan datang

**Dr. H. Zainudin Amali, M.Si.**  
Menteri Pemuda dan Olahraga RI



Peduli Persoalan  
Olahraga Nasional;

# **Menpora Apresiasi Fraksi PKS**



Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

# KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI

**fraksi.pks.id**



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI